



# MAJALAH Parlementaria

EDISI 204 • TH. 2021

## KALEIDOSKOP DPR RI 2021



## PENGANTAR REDAKSI

**T**im redaksi Majalah Parleментарia pada edisi 204 merangkum berbagai aktivitas kedewanan yang dijalankan oleh para Anggota DPR RI. Sepanjang tahun 2021 ini, ada banyak hal yang telah diperjuangkan oleh 575 wakil rakyat meskipun tak sampai ke telinga rakyat.

Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani menjamin, lembaga yang dipimpinnya ini tetap mengupayakan yang terbaik bagi rakyat. Contohnya saja vaksinasi. DPR RI bahu-membahu membantu pemerintah menyelesaikan vaksinasi di dapilnya masing-masing. Tak hanya bagi Bangsa Indonesia, melalui diplomasi parlemen, DPR juga mendorong agar semua bangsa memiliki akses yang sama terhadap vaksin.

Kemudian, Tim Redaksi juga merekam penetapan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) dari Fraksi Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024 pada akhir September 2021. Penetapan yang dilakukan dalam Rapat paripurna DPR RI itu sekaligus persetujuan pergantian M. Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI.

Dari Komisi V DPR RI, pembahasan UU Jalan berhasil dirampungkan pada akhir November ini dan akan telah disahkan pada Rapat Paripurna. Kemudian di Komisi VIII, setelah dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi, DPR segera medesak Kementerian Agama untuk memastikan para jemaah haji Indonesia aman untuk diberangkatkan. Baik itu dari sisi administrasi, vaksinasi, maupun protokol kesehatan. Apalagi beribadah ke tanah suci sudah sangat dirindukan oleh jemaah asal Indonesia.

Masih banyak lagi aktivitas kedewanan yang berhasil dirangkum oleh **Tim Redaksi Parleментарia** sepanjang tahun 2021 ini. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

*Parleментарia*



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR\_RI



@DPR\_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



# Parleментарia

## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

### PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

### PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

### W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciaty, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

### REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

### SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual Ramadhina, A.Md.Ds, Prima Danutirto, A.Md

### ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

### FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldin Opie, Hasri Mentari

### ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Sahaana, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Hidayatulloh

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Parlementaria

EDISI 204 • TH. 2021



6



12



27



58

KALEDOSKOP 2021

- 6 Dr. (H.C) Puan Maharani : DPR Berjuang Pulihkan Indonesia dari Pandemi
- 10 Lodewijk F. Paulus Gantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR
- 12 Sufmi Dasco Ahmad : Vaksin Dalam Negeri Harus Dipercepat
- 14 Rachmat Gobel : Sektor Industri dan Pertanian Harus Mampu Perkuat NKRI
- 16 Abdul Muhaimin Iskandar : Negara dan Visi Politik Kesejahteraan
- 18 Komisi I Kawal Migrasi TV Analog ke Digital
- 21 Komisi II Pastikan Pemilu Tetap Pada 2024
- 24 Komisi III Kompak Tegakan Supremasi Hukum
- 27 Komisi IV Komitmen Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pelik
- 30 Komisi V Dorong Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Bagi Rakyat
- 33 Komisi VI Berupaya Selesaikan Persoalan Yang Membelit BUMN
- 36 Komisi VII Maksimal Bekerja Meski Pandemi
- 39 Komisi VIII Beri Perhatian Khusus Pada Pelaksanaan Ibadah Haji
- 42 Komisi IX Fokus Selesaikan Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- 45 Komisi X Suarakan Aspirasi Bidang Pendidikan, Wisata dan Olahraga

- 48 Komisi XI Sambut Regulasi Pajak yang Baru
- 51 Baleg DPR RI Komitmen Tuntaskan Prolegnas dengan Legislasi Berkualitas
- 54 Banggar DPR RI Imbau LPEI Bantu UMKM
- 57 BURT DPR RI DPR Terima Penghargaan Lingkungan Ramah Disabilitas
- 60 BKSAP DPR RI Komitmen Tangani Perubahan Iklim
- 63 BAKN DPR RI Cermati Alokasi Dana Negara
- 66 MKD DPR RI Tegakkan Etik untuk Jaga Martabat Dewan
- 68 Sambut Parlemen Modern Dengan Big Data
- 70 BK DPR Komitmen Beri Dukungan Terbaik
- 72 Parlemen Modern Melalui Penganggaran yang Berkualitas, Berintegrasi dan Kolaboratif
- SUMBANG SARAN
- 74 DPR RI, Bekerja di Tengah Pandemi Covid-19
- 76 FOTO BERITA
- POJOK PARLE
- 78 Dengar Keluh-Kesah Masyarakat Sembari Nge-Vlog

1



**Jutaan** dosis vaksin sudah datang ke Indonesia dan sudah didistribusikan ke penjuru negeri. Pemerintah mengimbau masyarakat, tak perlu takut dengan vaksin ini. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi langkah besar pemerintah tersebut. Dimana, vaksinasi merupakan langkah awal bangsa ini memerangi sebaran Covid-19.

2



**DPR RI** bersama pemerintah berupaya menyempurnakan konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Poin penting dalam pembahasan PJP adalah merdeka belajar. Diantaranya mengurangi hal-hal yang tidak penting yang diterima anak-anak. Memerdekakan pola pikir anak-anak supaya lebih aware kepada lingkungan.

**Sepanjang tahun 2021,** Tim Redaksi Majalah Parlementaria berhasil merangkum berbagai permasalahan sosial masyarakat yang disoroti oleh Anggota DPR. Kesemuanya itu dibahas secara komprehensif dengan bahasa yang menarik di setiap edisinya



3

### Masalah

ketahanan pangan sendiri kembali menjadi perhatian dan diskusi publik, terlebih dengan merebaknya situasi pandemi Covid-19. Diskusi tersebut dilatarbelakangi terganggunya rantai pasokan pangan domestik dan proses produksi pangan. DPR RI kembali menggaungkan pembentukan Badan Pangan Nasional yang sebenarnya telah tercetus dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

5



**Provinsi** Papua dan Papua Barat saat ini masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai, implementasi UU Otsus belum menyentuh masalah-masalah mendasar. Jika ingin kesejahteraan maka revisi pada tataran implementasi dan evaluasi total pelaksanaan otsus selama 20 tahun, khususnya dari aspek penggunaan dan pemanfaatan anggarannya.

4



**Dua** kasus beruntun pada maret lalu yang menyasar Gereja Cathedral dan Mabes Polri kembali membuka mata kita bahwa teroris itu masih ada, mengintai siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Tak cukup hanya dengan penegakan hukum kepada pelaku teror, DPR menekankan perlu ada upaya memitigasinya diantaranya adalah melalui literasi digital. Masyarakat harus diedukasi, dan pemerintah perlu bertindak menertibkan informasi-informasi yang mengarah pada radikal.

6



### Pemerintah

berencana akan segera merealisasikan kebijakan PTM Terbatas di tahun ajaran baru pada Juli 2021. Aturan tata cara pelaksanaannya tersebut tertuang dalam SKB 4 Menteri. Namun, demi keselamatan generasi bangsa, DPR RI menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun.

9



Sudah dua kali, hari ulang tahun DPR RI 2021 diperingati saat dunia tengah menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan Parlemen tak akan berhenti melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

11



**DPR RI** tak akan pernah berhenti untuk menjadi alarm bagi pemerintah ketika rakyatnya sedang kesusahan. DPR memandang perlu ketegasan hukum atas keberadaan pinjol.

Stigma bahwasanya pinjol adalah solusi keuangan harus dipatahkan dengan cara memberi kemudahan akses perbankan bagi masyarakat kecil dan UMKM. Selain itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan literasi-literasi digital finansial.

8



Di hari ulang tahun yang ke 76, Bangsa Indonesia juga dunia masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir. Meski demikian, negara tidak boleh berpasrah diri. Rakyat harus dilindungi, pun demikian pembangunan nasional tak boleh terhenti. Dari Senayan, para wakil rakyat tetap konsisten menjalankan prinsip check and balance terhadap program pemerintah dalam rangka memastikan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan demi kesejahteraan rakyatnya.

10



**PON XX** yang diselenggarakan di Bumi Cenderawasih ini menjadi momentum yang sangat ideal untuk menyatukan anak bangsa. Semua etnis, bahasa dan agama yang ada di nusantara ini menyatu di Bumi Papua. Momentum PON seharusnya memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua yang diharapkan kian menggeliat menuju kesejahteraan yang optimal.

7



**Covid-19** semakin mendekati lingkaran terkecil kita. Sirine ambulan dan pengumuman duka dari pengeras suara di masjid-masjid hampir setiap harinya terdengar. Semua itu menunjukkan bahwa Covid-19 masih merajalela. Pada akhirnya, konsistensi kebijakan mulai dari tingkat paling tinggi hingga terendah menjadi penentu kesuksesan dalam mengatasi pandemi ini.

## Dr. (H.C) Puan Maharani: DPR Berjuang Pulihkan Indonesia dari Pandemi

Sepanjang 2021, Dunia masih diselimuti oleh pandemi Covid-19. Banyak kebijakan negara terpengaruh dari virus yang pertama ditemukan di Wuhan, China ini. Pun begitu di Indonesia, DPR RI sebagai wakil dari rakyat terus mengupayakan yang terbaik bagi masyarakatnya, baik itu terkait vaksinasi maupun pemulihan ekonomi.



### KETUA DPR

RI Dr. (H.C.)

Puan Maharani meminta semua pihak tidak lengah menghadapi perkembangan kasus Covid-19. Secara khusus,

ia meminta pemerintah mencermati peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara lain. Peningkatan kasus seperti di India setelah penularan kasus dilaporkan menurun, jangan sampai terjadi di Indonesia. Di beberapa negara juga mulai ada peningkatan kasus yang sama, kurva penularan naik lagi.

Pengalaman-pengalaman beberapa negara di mana kasus penularan kembali meningkat, menurut Puan, harus jadi pelajaran bagi pemerintah dalam penanganan Covid-19. "Meski sudah ada vaksinasi, jangan lengah dengan melonggarkan kebijakan.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (2/3/2021). Foto: Eno/mvl

Jangan ambil risiko yang memicu peningkatan kasus," tegas Puan.

Puan meminta pemerintah pusat dan jajaran di bawahnya terus disiplin menegakkan protokol kesehatan, apalagi di tengah banyaknya acara keagamaan di bulan Ramadan ini. "Kewajiban memakai masker dan menjaga jarak serta membatasi kerumunan harus dijalankan secara disiplin. Masyarakat juga harus disiplin," ujar Puan.

Ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, Maret lalu, Puan Maharani menegaskan Puskesmas memegang peranan penting dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. "Puskesmas menjadi ujung tombak pelaksanaan program vaksinasi Covid-19," ujar Puan.

Puan melanjutkan, puskesmas

adalah agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan. Diketahui, prioritas daerah, situasi Covid-19 di daerah, kesiapan sarana dan prasarana penyimpanan vaksin dan penyelesaian target vaksinasi tahapan sebelumnya menjadi pertimbangan guna mencapai vaksinasi yang berkeadilan. "Lewat puskesmas, warga di desa-desa

terjangkau vaksinasi sehingga prinsip vaksinasi berkeadilan terpenuhi," ucapnya.

### DIPLOMASI VAKSIN

Tak hanya di dalam negeri, DPR RI juga memperjuangkan pemerataan hak-hak masyarakat dunia atas vaksin di forum internasional. Misalnya, di awal tahun 2021, Puan menegaskan bahwasanya rakyat Palestina berhak mendapatkan vaksinasi Covid-19 seperti warga dunia lainnya. Ia mendesak komunitas internasional untuk membantu atasi pandemi Covid-19 di Palestina.

"Terdapat kebutuhan mendesak untuk membantu rakyat Palestina mengatasi Covid-19, termasuk memberikan akses terhadap vaksin," ungkap Puan ketika menjadi salah satu *Keynote Speaker* secara

virtual dalam forum *'Al-Quds Brings Us Together—Together Against Normalization Of Relations With The Zionist Regime'* yang digelar di Teheran, Iran.

Pertemuan terdiri dari dua sesi yang terdiri dari sesi para Ketua atau Deputi Parlemen, dan sesi yang terdiri dari Ketua Komisi Luar Negeri negara-negara yang mendukung Palestina. "Pandemi Covid-19 dapat digunakan sebagai momentum untuk mendesak rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina. Rakyat Palestina saat ini harus bersatu menghadapi pendudukan Israel dan mengatasi pandemi Covid-19," tegasnya.

"Saya menyerukan kepada semua negara yang hadir pada pertemuan ini untuk tetap solid dan terus memperkuat dukungan kita terhadap Palestina sehingga Bangsa Palestina dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia," seru perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Tak hanya itu, di sela-sela forum *Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)* di Wina, Austria, September lalu, Puan bertemu dengan

Ketua Parlemen Korea Selatan dan Ketua Parlemen Timor Leste. Dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Nasional Republic of Korea, Park Byeong-Seug, Puan menyampaikan apresiasi atas dukungan negara tersebut bagi Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam beberapa kesempatan, Korea memberi bantuan peralatan kesehatan dan obat-obatan.

"Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan Korea Selatan untuk penanganan pandemi Covid-19 di negara kami," kata Puan. Lebih lanjut, Puan berharap agar kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan untuk memproduksi alat-alat kesehatan semakin dipercepat. Kerja sama tersebut, kata Puan, termasuk untuk *testing, tracing, treatment*, hingga alih teknologi.

Selain itu, kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk *treatment* Covid-19 juga diharapkan dapat semakin diintensifkan. Melalui Park Byeong-Seug, Puan

mengajak Korea untuk berjuang bersama dalam upaya keadilan dan kesetaraan vaksin Covid-19 bagi semua orang. Politisi PDI-Perjuangan ini juga menitikpkan pesan agar Korea menjamin kemudahan akses vaksin untuk warga negara Indonesia yang ada di sana.

## SEKTOR BUDAYA HARUS SEGERA BANGKIT

Pelestarian budaya lokal menjadi esensial untuk mencegah redupnya energi pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Bagi Puan, kearifan lokal berupa sistem sosial dan budaya yang bisa mendukung perekonomian warga setempat.

"Kami menyadari budaya adalah energi pariwisata. Jadikan ini sebagai modal menggerakkan wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi sekaligus mengamati kegiatan di Desa Wisata Osing. Tentu, ini diharapkan bisa mendukung perekonomian warga setempat," terang Puan saat berkunjung ke Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren, Banyuwangi, Jatim, Februari lalu.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan seni dan budaya turut menjadi esensi pembentuk pribadi bangsa. Tidak hanya menjadi esensi pribadi dan bangsa, seni dan budaya masyarakat Osing bisa diwariskan nilai-nilai hidupnya kepada generasi saat ini.

"Seni dan budaya merupakan salah satu pilar membangun kepribadian bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Maka, penting memperkuat kearifan lokal sebagai falsafah nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus rawat warisan leluhur supaya bisa diturunkan," tegasnya

Penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana ini turut mengapresiasi para seniman Osing sekaligus segenap masyarakat Banyuwangi yang tidak lelah berkarya dalam kondisi terbatas. Puan meminta agar pemerintah setempat tetap melindungi pelaku budaya dan pariwisata dari dampak pandemi Covid 19.



Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuan bilateral dengan beberapa ketua parlemen di sela-sela forum *Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)* di Wina, Austria. Foto: Ist/mt



Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo bertemu dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, Jatim, Kamis (29/4/2021). Foto: ist/mvl

## PRIHATIN TENGGELAMNYA NANGGALA-402

April lalu, bangsa Indonesia dikejutkan dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, Jawa Timur. Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Puan turut bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada keluarga korban kapal selam yang dinyatakan *subsunk* di utara laut Bali tersebut.

“Kami menyadari bahwa duka yang paling dalam pasti dirasakan oleh anggota keluarga, karena itu sejak awal DPR-RI terus berkomunikasi dengan pemerintah agar Negara memberikan perhatian kepada para keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Puan.

Puan menyampaikan, sebagai salah satu bentuk penghormatan pada awak KRI Nanggala-402, di Gedung DPR/MPR dan di seluruh rumah

dinas anggota DPR/MPR dikibarkan bendera merah putih setengah tiang pada 26-28 April 2021. “Saat ini kita menghormati keluarga yang masih sangat berduka. Begitu juga kita tahu Indonesia masih kaget dan berduka dengan adanya peristiwa ini,” ujarnya seraya memastikan bahwa DPR RI akan membahas segala sesuatu dengan pemerintah terkait tragedi KRI Nanggala-402 dan keseluruhan alutsista serta pertahanan Indonesia.

## PERKUAT INDUSTRI PERTAHANAN

Di bidang pertahanan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pentingnya menguatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu cara memenuhi ketersediaan alat peralatan pertahanan nasional. Menurut Puan, hal itu adalah komitmen yang harus diwujudkan sesuai UU Nomor 16

Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Puan menjelaskan, UU tentang Industri Pertahanan dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusianya.

“Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun *deterrence effect* terhadap negara lain,” kata Puan saat memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan





Ketua DPR RI Puan Maharani saat berkunjung ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E Mabes TNI AD. Foto: Ist/nvl

Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E Mabes TNI AD, Jakarta, Juni lalu.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu menuturkan, negara yang memiliki industri pertahanan kuat dan maju memiliki keuntungan lebih dalam mengendalikan arah politik, yang dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik.

Puan menegaskan bahwa TNI harus membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. "Pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan," kata Puan.

### PEMINDAHAN IKN

Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Pindahan Ibu Kota Negara dari Pemerintah yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir September lalu.

Puan mengungkapkan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah ada sejak lama. "Yang kami harapkan dari pemerintah dalam

merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara adalah perlunya sosialisasi dan persiapan yang matang terkait pembangunan Ibu Kota Baru yang meliputi aspek regulasi, sampai hal-hal teknis yang semua proses itu dikoordinasikan dengan DPR RI," papar Puan.

Terkait pemindahan IKN, Puan memastikan, DPR RI akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Ia juga berharap RUU IKN dapat memenuhi kebutuhan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dari semua sisi dan pertimbangan yang ada.

"RUU IKN nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya yang lebih komprehensif yang pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah dan DPR tapi juga semua elemen bangsa dalam memberi masukan," jelasnya.

RUU IKN yang disampaikan pemerintah terdiri dari 9 bab yang berisi 34 pasal. RUU mengatur soal isi dari Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

• es



Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar konferensi pers usai menerima draf RUU IKN di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Foto: Ena/nvl



Lodewijk F. Paulus (dua dari kiri) usai ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI Korpolkam. Foto: Jaka/nvi

## Lodewijk F. Paulus Gantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) dari Fraksi Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024 pada akhir September 2021. Penetapan tersebut sekaligus persetujuan pergantian M. Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI.

dipandu Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ikrar Lodewijk.

Pengambilan sumpah Lodewijk disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, serta tiga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Abdul Muhaimin Iskandar. Puan berharap bergabungnya Lodewijk Paulus di Pimpinan DPR RI dapat memperkuat tugas-tugas konstitusional kedewanan. “Semoga dengan



**KETUA** DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan, Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Dewan Partai Golkar Nomor

B 663 Tanggal 28 September 2021 perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024. Setelah mendapatkan persetujuan Anggota Dewan, upacara pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI

bergabungnya saudara Lodewijk akan memperkuat tugas konstitusional dewan,” harap Puan.

Tak berselang lama, sebagai Pimpinan DPR RI Korpolkam yang mengoordinasi Komisi I DPR RI, Lodewijk berharap Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surat presiden terkait pengajuan nama calon panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Kala itu pada akhir September, Presiden Jokowi belum mengajukan nama calon Panglima TNI, mengingat Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada Desember 2021. Akhirnya pada awal November 2021, DPR RI menerima surpres calon Panglima TNI.

Selain menjabat Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk saat ini duduk sebagai Anggota Komisi I DPR RI. TNI merupakan salah satu mitra kerja Komisi I DPR. Lodewijk turut memberikan komentar terkait isu TNI disusupi PKI. “Tentunya kita harus punya fakta yang kuat, apa sih yang disebut disusupi, siapa yang menyusupi, di mana disusupi. Nah, tentunya kalau kita melihat itu apa indikatornya, apakah indikator karena patung dipindahkan itu sebagai indikator? Mari kita kaji secara akademik,” kata mantan Danjen Kopassus itu.

Lodewijk menegaskan tolok ukur suatu institusi disusupi PKI harus dikaji mendalam. Menurutnya, tidak bisa begitu saja menyatakan TNI disusupi PKI tanpa fakta yang jelas. “Jadi tentunya tolok ukur dari suatu institusi apalagi TNI disusupi yang dikatakan PKI, tentunya kita harus kaji lebih mendalam, tidak membuat gaduh tentang kondisi kebangsaan yang sekarang kita sedang fokus bagaimana menanggulangi penyebaran Covid-19 dan juga mengejar pertumbuhan ekonomi, kita menjaga itu,” ucapnya.

Lodewijk meminta mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo membuktikan indikator bahwa TNI disusupi PKI. Pembuktian begitu penting agar masyarakat mendapatkan informasi

yang valid. “Itu yang diharapkan (dibuktikan). Kita hanya ingin klarifikasi, kita ingin ada pembuktian sehingga masyarakat juga terinformasikan dengan baik bahwa kalau itu betul indikatornya apa, faktanya apa,” sebut Lodewijk.

Lodewijk memastikan TNI juga sudah memiliki proses rekrutmen yang jelas kepada para bintanga hingga tamtama sebelum masuk ke TNI. Menurutnya proses rekrutmen itulah yang bisa mencegah masuknya paham komunisme ke dalam tubuh TNI. “Kalau saya melihat proses rekrutmen dari prajurit TNI, baik itu dia tamtama, bintanga, maupun perwira, kita ada namanya tes ideologi. Itu orang diwawancarai, ditanya tentang masalah-masalah seperti itu,” ujarnya.

### **DORONG PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA-AS**

Lodewijk menerima kunjungan Ketua Subkomite Parlemen Amerika Serikat untuk Asia Pasifik Ami Bera pada pertengahan November lalu. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk penanganan Covid-19. Lodewijk berharap kedua negara dapat terus memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara.

Lodewijk juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang sebelumnya diberikan Amerika terhadap Indonesia. “Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas bantuannya kepada Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19, seperti vaksin, ventilator, dan obat-obatan,” ujar legislator dapil Lampung I tersebut.

Lodewijk mengatakan jika Indonesia menyambut baik dukungan yang diberikan negara-negara sahabat terkhusus Amerika. Tidak hanya bantuan dalam menangani pandemi Covid, namun juga dukungan dalam

pemulihan ekonomi di berbagai aspek. “Indonesia juga terbuka terhadap kerja sama konkrit untuk implementasi *ASEAN Outlook on The Indo-Pacific* yang terfokus pada empat prioritas. Yakni kerja sama maritim, konektivitas, *Sustainable Development Goals*, serta perdagangan dan investasi,” komitmen Lodewijk.

### **AZIS SYAMSUDDIN AJAK PERAN AKTIF MASYARAKAT KAWAL 33 RUU PROLEGNAS**

Rapat Paripurna DPR RI pada akhir Maret 2021 telah menetapkan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021. Sebelum digantikan Lodewijk, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan DPR tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan tetap memperhatikan kualitas legislasi yang dihasilkan.

DPR terus membuka ruang dialog, diskusi untuk menerima masukan, saran hingga kritik sehingga RUU yang disahkan benar-benar bermanfaat dan memenuhi kebutuhan hukum seluruh masyarakat Indonesia. “Perlu kembali kami tegaskan, bahwa DPR tetap mendukung revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan meminta masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah yang saat ini tengah menyerap aspirasi dan mengkaji revisi UU ITE,” terang politisi Partai Golkar itu.

Azis pun menyambut baik rencana Pemerintah Indonesia yang ingin melakukan revisi terhadap UU ITE. Hal itu dinilai lantaran banyaknya pasal karet, tidak berkeadilan, serta multitafsir dalam UU tersebut. “Masyarakat diharapkan juga dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Diharapkan revisi ini juga tidak melepas niat baik awal hadirnya UU ITE. Saat ini UU ITE selalu dijadikan untuk saling melaporkan terhadap pihak yang saling berseberangan karena permasalahan kecil di media sosial,” kata legislator dapil Lampung II tersebut. ● sf/es

## Sufmi Dasco Ahmad: Vaksin Dalam Negeri Harus Dipercepat

Pemerintah diminta untuk segera mempercepat pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri. Pasalnya, vaksin saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya melawan pandemi Covid-19. Selain menjadi kebutuhan yang mendesak, vaksin dalam negeri juga bisa menjadi solusi apabila embargo vaksin dilakukan oleh sejumlah negara.



**WAKIL** Ketua DPR RI Sufi Dasco Ahmad menegaskan, pemerintah perlu segera mempercepat proses uji klinis dan produksi

vaksin dalam negeri. Baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin Nusantara. Jangan sampai Indonesia menjadi korban embargo vaksin dan masyarakat menjadi korban.

Dasco berharap, proses vaksin Merah Putih segera dipercepat dan Vaksin Nusantara segera menyiapkan uji klinis tahap dua. Dengan demikian, Indonesia dapat terhindar dari ancaman kelangkaan vaksin. "Mohon segera juga berkoordinasi dengan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan untuk uji klinis tahap dua. Vaksin saat ini menjadi kebutuhan yang cukup mendesak," usul Dasco.

### BUTUH KERJA SAMA MINIMALISIR DAMPAK PANDEMI

Sementara itu, dalam meminimalisir dampak pandemi Covid-19 dibutuhkan kerja sama antar semua unsur

terutama selama momen Idul Fitri 1442 H. Menurut Dasco, sebagian masyarakat masih nekat mudik, pergi berwisata dan melakukan kegiatan yang berpotensi mengundang keramaian dan kerumunan.

Kerja sama tersebut perlu dibangun mulai dari pemerintah yang mempertimbangkan dan mengeluarkan kebijakan hingga masyarakat yang harus sadar dan taat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dasco menilai, pemerintah sudah berusaha maksimal mencegah lonjakan angka terhadap pengidap

Wakil Ketua DPR RI  
Sufmi Dasco Ahmad.  
Foto: Tim/nvl

Covid-19 di Tanah Air. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi dan sadar menerapkan protokol kesehatan 5M.

"Saya sangat *concern* karena saya pernah merasakan bagaimana rasanya terjangkit Covid-19. Jangan sampai apa yang saya alami juga dialami masyarakat. Jadi tolong tetap jaga kesehatan dan patuhi terus prokes," pesan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

### KEBUTUHAN OBAT ANTIVIRUS SEGERA TERPENUHI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari PT Kimia Farma terkait pengadaan obat-obatan untuk





Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR RI saat meninjau Pabrik PT Kimia Farma Plant Banjaran, Bandung di Jawa Barat, Kamis (29/7/2021). Foto: Jaka/nvi

penanganan Covid-19. Dimana, Kimia Farma saat ini sudah bisa memproduksi sendiri obat antivirus Favipiravir dengan kapasitas produksi dua juta tablet per hari.

“Kabar bagus untuk rakyat Indonesia. Selama ini kita mengenal obat anti virus avigan, Kimia Farma sudah memproduksi obat jenis yang sama dengan nama Favipiravir (nama generiknya) dengan kapasitas produksi dua juta per hari,” ujar Dasco didampingi Satgas Lawan Covid-19 DPR RI saat meninjau pabrik PT Kimia Farma Plant Banjaran, Bandung, Jawa Barat, Juli lalu.

Dasco menuturkan, ketersediaan bahan baku obat pun saat ini masih tercukupi. Dalam hal produksi, Kimia Farma juga dibantu oleh dua pabrik lain dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 juta tablet per hari, sehingga total produksi obat akan mencapai 3,5 juta tablet per hari. “InsyaAllah dengan Kimia Farma dan beberapa pabrik lainnya, kebutuhan obat antivirus akan segera terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau,” sambungnya.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, pada bulan Oktober 2021, uji klinis avigan akan selesai, selanjutnya akan ada lagi obat Molnupiravir (obat Covid-19). “Kalau ada yang Covid, di-*kasih* minum (obat) itu tanpa perlu dicampur-campur dengan yang lain-lain, Insya Allah baik (sembuh). *Nah*, ini merupakan kabar gembira buat dunia kesehatan kita, terutama buat rakyat Indonesia,» tutur Dasco.

### TINJAU VAKSINASI DI PASAR TANAH ABANG

Juli lalu, bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Dasco meninjau vaksinasi bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang. Dirinya mengaku senang melihat antusiasme para pedagang yang tengah mengikuti proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh IKAPPI bekerjasama dengan Polri tersebut.

“Pada hari ini kami meninjau vaksinasi yang diselenggarakan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan Polri. Vaksinasi di sini sudah rencanakan

di DPR beberapa waktu lalu,” ungkap Dasco yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dan Anggota Komisi III DPR RI Habiburrahman di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta.

Memasuki hari ketiga, antusiasme para pedagang untuk mendapatkan vaksinasi masih tinggi. “Pedagang menyatakan bahwa mereka tidak ingin menyerah apalagi mengibarkan bendera putih. Mereka ingin vaksinasi supaya bisa terus melanjutkan roda perekonomian dan menang lawan Covid-19,” tandas Dasco.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyarankan kepada pengelola pasar supaya kuota vaksinasi hariannya ditambah. Hal tersebut ditunjukkan dengan animo yang besar pedagang dari blok lain juga masih meminta penambahan hari untuk vaksinasi.

### MINTA KAJI ULANG PCR UNTUK MODA TRANSPORTASI

Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana untuk mewajibkan Tes PCR untuk semua moda transportasi. Sebab, menurut Dasco, Rabu (27/10/2021), masih banyak masyarakat menilai harga Tes PCR sebesar Rp300 ribu terlalu mahal. Meski demikian, Dasco menyebut penentuan harga Rp300 ribu tersebut sudah sesuai dengan yang diminta oleh DPR beberapa waktu lalu. Hal ini supaya masyarakat yang ingin bepergian tidak ragu atau tidak merasa berat dengan Tes PCR yang ada.

Untuk moda transportasi udara, Dasco menilai masih diperlukan Tes PCR untuk menghindari penularan Covid-19 antarpulau. Dirinya meminta pemerintah memikirkan bagaimana masyarakat yang mengikuti syarat menjalani Tes PCR agar lebih mudah.

“Kemudian mengenai tata cara PCR nya itu yang perlu *gimana* caranya supaya masyarakat bisa dengan mudah mengikuti persyaratan tersebut dan tidak membuat sesak ketika, melakukan penerbangan,» ujarnya. ● pun/es

## Rachmat Gobel: Sektor Industri dan Pertanian Harus Mampu Perkuat NKRI

Krakatau Steel merupakan industri strategis. Industri yang bersifat jangka panjang dan juga padat modal dan padat teknologi. Sehingga perlu di-*support* agar perusahaan tersebut bisa turut serta memperkuat NKRI di bidang industri.



### SAAT

menyambangi PT Krakatau Steel (Persero), Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai Krakatau Steel tidak hanya sekedar pabrik

yang menyediakan lapangan pekerjaan. Lebih dari pada itu, Krakatau Steel punya tanggung jawab untuk memperkuat kepentingan nasional.

Menurutnya, membangun industri itu lebih kompleks, ada penelitian yang serius dan dalam, ada pembangunan sumber daya manusia, lingkungan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Gobel turut mengapresiasi Direktur Utama Krakatau Steel yang telah mampu membawa perubahan secara bertahap dan menata manajemen ke arah yang lebih baik. Dia juga berharap agar Krakatau Steel bisa memenuhi kebutuhan pelat baja untuk industri otomotif.

### RANCANG KAWASAN EKONOMI HALAL DI GORONTALO

Dalam kesempatan lain, Rachmat Gobel sempat

mengungkapkan tentang kawasan ekonomi halal di wilayah Gorontalo ditujukan untuk memecah kemiskinan dan menyejahterahkan rakyat yang tinggal disekitar daerah itu. Untuk mewujudkannya, ia akan menggandeng kerja sama dengan Turki dan Jepang yang memiliki ekonomi kuat dan teknologi yang maju. Kawasan itu bukan hanya restoran, juga ada industri pertanian, peternakan, kelautan hingga industri olahan.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, Gorontalo setidaknya memiliki tiga kekuatan yang potensinya bisa lebih digali dan dimaksimalkan lagi, yakni, pertanian, perkebunan dan kelautan. Menurutnya, setidaknya diperlukan 50.000 hektar untuk industri pengolahan beras atau jagung. Jika tiap 1000 hektar dibutuhkan satu mesin industri, berarti akan ada 50 mesin tersebar di Gorontalo.

### PENANGANAN PUPUK SUBSIDI HARUS DITINJAU

Penanganan terkait masalah pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian, serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata. Seperti diketahui, hingga sampai saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.

“Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa,



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Jaka/mvi

kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total. Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian,” ujar Gobel.

### PERLU SINERGI BERSAMA ATASI PERSOALAN BERAS

Rachmat Gobel mendorong agar ada sinergi antara lembaga pemerintah dalam mengatasi persoalan beras. Jika dapat diatasi, maka kedaulatan dan ketahanan pangan nasional akan dapat terwujud. Menurut Gobel, beberapa persoalan yang acapkali terjadi mulai dari harga gabah yang anjlok saat panen, langkanya pupuk dan benih ketika memasuki musim tanam. Serta permasalahan produktivitas yang belum optimal dan wacana impor beras yang kerap menuai pro kontra.

Untuk impor beras misalnya, Gobel menuturkan sebagai negara besar dengan kapasitas yang cukup, tindakan impor tersebut memalukan. Ia mendorong agar Indonesia tidak mengemis ke negara lain terkait kebutuhan pangan tersebut. Oleh karena itu, politisi fraksi Partai NasDem tersebut berpesan agar Bulog dapat menjalankan perannya dengan baik lewat ikut serta mendorong pertanian menghasilkan produk berkualitas. Gobel mengimbau agar Bulog bersama pemerintah mencari terobosan-terobosan baru.

### NEGARA HARUS BANGUN EKOSISTEM PERTANIAN MILENIAL

Di tempat berbeda, Rachmat Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional, sektor strategis yang harus dijaga. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian dan para petani merupakan penjaga harkat dan martabat bangsa. Dia pun mengingatkan, agar para pemangku kebijakan mampu membangun ekosistem pertanian



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat mengunjungi PT Krakatau Steel (Persero) di Cilegon, Banten, Selasa (16/3/2021).  
Foto: Rifky/mf

sehingga para milenial tertarik untuk menjadi petani.

Gobel pun mengungkapkan, akibat perubahan iklim dan terus bertambahnya penduduk dunia, masa depan dunia bisa terancam oleh krisis pangan. Pemikiran strategis seperti itu, katanya, penting untuk dipahami milenial. Untuk itu ia mengusulkan penguatan kelembagaan petani seperti koperasi. Menurut Gobel saat ini, petani menghadapi kesulitan permodalan dan keterbatasan sentuhan teknologi pertanian seperti traktor dan mesin pengering gabah. Menurutnya petani Indonesia umumnya masih butuh bantuan permodalan untuk bisa bertani secara modern.

### APRESIASI TERBENTUKNYA BUMDES BERSAMA SITUBONDO

Terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Situbondo, Jawa Timur yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

Diketahui, BUMDes Bersama Situbondo dibentuk secara gotong royong dan merupakan gabungan dari 60 desa di Situbondo. BUMDes Bersama Situbondo, menurut Gobel

banyak memberikan nilai tambah, sehingga layak untuk dijadikan role model bagi BUMDes di daerah lain. Gobel menyarankan agar pihak BUMDes Bersama Situbondo mulai memetakan potensi yang ada, menghimpun sumber daya manusia (SDM) kemudian mulai merumuskan visi BUMDes yang disesuaikan dengan keragaman yang dimiliki.

### PEMERINTAH HARUS PRIORITASKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

Sementara menyangkut soal RAPBN 2022, Rachmat Gobel menilai cukup realistis. Itu tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021, serta defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah.

Ia menekankan agar pemerintah lebih prioritas pada belanja produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menjauhi penggunaan produk impor. Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran. ● dep/es



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar . Foto: Ojivri

## Abdul Muhaimin Iskandar: Negara dan Visi Politik Kesejahteraan

Negara dengan segala sumber daya yang dimiliki harus menjamin kesejahteraan seluruh anak bangsa. Itu adalah gagasan utama negara kesejahteraan. Dimana, kesejahteraan bukan hanya soal pencapaian ekonomi yang diukur melalui beberapa indikator utama, tetapi juga soal pengelolaan lembaga yang sedemikian rupa mampu mendukung terciptanya kesejahteraan.

distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil.

Garis besar arah kerja yang diemban Gus Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tertuang dalam Buku Negara dan Politik Kesejahteraan. Buku tersebut secara garis besar membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) demokrasi ekonomi dan gagasan ekonomi kerakyatan.

Namun visi mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara tersandung pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia sejak awal 2020. Pandemi telah meruntuhkan nyaris seluruh sendi perekonomian, masyarakat kelas bawah, terutama pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak. Dalam kondisi demikian, negara dengan segala sumber daya

yang dimiliki sesungguhnya telah mengambil langkah dan kebijakan untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi secara ekonomi dan kesehatan.

Berbagai skema perlindungan sosial pun telah diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara sehingga masyarakat tidak semakin terpuruk dalam bencana tersebut. Berkaca pada kondisi saat ini, persoalan yang sesungguhnya sangat penting dilakukan adalah memastikan kehadiran negara sehingga masyarakat tidak merasa sendirian. Itulah esensi tugas negara. Undang-undang secara amat gamblang telah mengamankan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah serta memajukan kesejahteraan umum.

### BANGUN SDM UNGGUL

Gus Muhaimin menilai misi pemerintah untuk menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, tidak ada negara



**WAKIL** Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menuangkan konsep kesejahteraan negara dalam bukunya

yang berjudul 'Negara dan Politik Kesejahteraan, Reorientasi Arah baru Pembangunan'. Menurut Gus Muhaimin, dalam konteks pengelolaan lembaga negara dan pendukungnya itulah, demokrasi tidak dapat diartikan semata-mata sebagai *equal opportunities*, tetapi juga alokasi dan



maju tanpa SDM unggul, karena itu keinginan Presiden Jokowi harus didukung dan diwujudkan, salah satunya dengan bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat.

“Tingkat literasi kita bisa meningkat. Ironis sekali kalau melihat data tingkat literasi kita dibandingkan beberapa negara lainnya,” ujar Gus Muhaimin.

Demi menciptakan SDM unggul, Gus Muhaimin mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.

Diketahui, hampir tiga juta penduduk Indonesia saat ini masih buta aksara, dan sebagian wilayah Indonesia memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional, yaitu Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), Kalimantan Barat (3,54 persen), Jawa Timur (3,21 persen), Sulawesi Tenggara (2,47 persen), Jawa Tengah (2,03 persen), dan Papua Barat (1,77 persen).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk berupaya memberantas buta aksara di Indonesia dengan cara meningkatkan literasi yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebab daerah tersebut sulit dijangkau, terutama di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, serta Program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat bersilaturahmi dengan ulama, kiai dan tokoh masyarakat Brebes-Tegal. Foto: Ojivivi

### ATASI KEMISKINAN EKSTREM

Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. Gus Muhaimin menyoroti fakta masih adanya kemiskinan ekstrem tersebut. Dia mengajak semua pihak bahu membahu mengatasinya.

“Miskin ekstrem ini keadaan yang harus kita antisipasi bersama, terutama NU. Saya mendapat laporan di Kabupaten Brebes ini masih ada warga miskin ekstrem, dan itu nyata,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri Silaturahmi Ulama se-Brebes dan Tegal, di Brebes, Jawa Tengah, pertengahan Oktober 2021.

Gus Muhaimin menambahkan, secara umum terdapat dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi. Kedua, kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok

miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

### TOPANG KEKUATAN EKONOMI BARU DENGAN MELEK TEKNOLOGI

Gus Muhaimin mendorong agar santri tidak lengah menjadi bagian bangsa Indonesia dalam menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran Islam rahmatan lil alamin serta tradisi luhur Bangsa Indonesia.

Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Refleksi Hari Santri Nasional (HSN) 2021, di kediaman Pengasuh Ponpes Al Madina Gunungpati Semarang, Habib Umar Muthahar, akhir Oktober 2021. Peringatan Hari Santri sendiri diperingati setiap tanggal 22 Oktober, dimana pada tahun 2021 mengusung tema “Santri Siaga Jiwa dan Raga”.

Gus Muhaimin berharap, santri dan pesantren dapat terus menjadi kekuatan besar bagi negara, sumber inspirasi sekaligus salah satu sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Karena itu, dia berujar, santri perlu menekankan dua hal. Pertama, santri harus menjadi penopang kekuatan ekonomi baru. “Kenapa? Karena sekarang ini semua rontok. Dan peran santri sangat dibutuhkan saat ini,” ucapnya. ● eko/es

## Komisi I

# Kawal Migrasi TV Analog ke Digital

Indonesia secara bertahap akan mulai migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Dihentikannya siaran TV analog berkaitan dengan efisiensi dalam penggunaan frekuensi. Terkait hal ini, Komisi I akan terus mengawal proses tahapan migrasi hingga mencapai *Analog Switch Off (ASO)* pada November 2022 mendatang.



Panja RUU PDP Komisi I DPR RI memberikan pernyataan pers terkait progres pembahasan RUU PDP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Foto: Andri/Rni



**KOMISI I** menilai ada beberapa kendala yang menjadi tantangan pemerintah untuk menuju ASO. Pertama, distribusi alat

*Set Top Box* (alat konversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog/STB).

Berdasarkan catatan Kominfo, jumlah warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos berjumlah 6,7 juta rumah tangga miskin yang terdata sebagai Calon Penerima Bantuan STB secara gratis. Sebanyak empat juta unit STB telah terkumpul dari penyelenggara multipleksing. Kekurangannya, tiga juta unit akan disediakan oleh pemerintah melalui APBN, namun baru satu juta unit STB yang dialokasikan

dalam APBN Tahun Anggaran 2022.

Kedua, berkaitan dengan pemancar TVRI, khususnya yang masih transmisi Analog VHF dan UHF. Sebanyak 206 tiang pemancar jaringan TVRI butuh di-*upgrade* dari analog ke digital. Sehingga kalau ini tidak dilakukan, maka TVRI tidak bisa melakukan siaran di 206 pemancar tersebut jika ASO berlaku.

Adapun, peralihan TV analog ke TV digital diatur dalam Pasal 60A

ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun batas penghentian siaran TV analog pada 2 November 2022.

Kominfo menetapkan tiga tahapan dan jadwal penghentian siaran televisi analog dan ASO yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga 2 November 2022.

Hingga saat ini, tercatat 277 lembaga penyiaran atau 39,74 persen dari total yang sudah menyediakan siaran digital. Kominfo memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran untuk mengatur waktu beralih ke siaran digital menurut perencanaan masing-masing, selama dilakukan sebelum ASO.

### **BERUPAYA SELESAIKAN RUU PDP DAN RUU PENYIARAN**

Sementara itu, di bidang legislasi, Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU PDP) tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja Komisi I dengan Pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis, terdapat perbedaan sikap antara Komisi I DPR dengan Pemerintah terkait penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Awalnya, Komisi I dan Pemerintah memiliki kesepahaman bahwa DPR dan pemerintah menghendaki lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun, saat dalam pembahasan, Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika Kominfo tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya. Panja pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah Kementerian Kominfo.

Sementara, keberadaan badan pengawas data pribadi independen sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai dengan standar



Pimpinan Komisi I DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Foto: Arief

internasional, yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan jika berkaca pada negara lain, otoritas pengawas data pribadi berada di lembaga independen. Sebab, lembaga ini akan bertugas mengawasi data pribadi yang ada di lembaga swasta maupun publik. Lembaga ini jugalah yang akan mewakili Indonesia jika terjadi masalah kebocoran data yang memerlukan perlindungan di luar negeri.

Adapun, saat ini Komisi I sedang mengupayakan titik temu dengan pemerintah terkait keberadaan pengawas independen sehingga pembahasan RUU dapat dilanjutkan.

Selain RUU PDP, Komisi I juga tengah menghimpun masukan dari berbagai *stakeholder* untuk mendapatkan data dan aspirasi terkait RUU Penyiaran.

Nantinya, Rancangan Undang-Undang Penyiaran akan disiapkan untuk mendukung implementasi

TV digital. Kendati pembahasannya dimulai dari awal, pembahasan RUU Penyiaran dengan status ASO akan mempermudah proses penyusunan RUU. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu melahirkan regulasi untuk media baru seperti *Over The Top* (OTT).

"Pada prinsipnya, DPR RI menginginkan konten penyiaran yang lebih variatif, lebih banyak pemilik stasiun televisi, *diversity of content* dan *diversity of ownership*. Hal ini bertujuan agar keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi bagi pemirsa dapat menjadi referensi tayangan yang lebih kaya dan berkualitas," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono.

### **UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PANGlima TNI**

Sepanjang tahun ini, Komisi I DPR RI juga melakukan rangkaian *fit and proper test* terhadap 33 calon duta besar luar biasa berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia. *Fit and*



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dengan Andika Perkasa usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Foto: gerald/rvl

proper test dilaksanakan secara tertutup dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kemudian, Komisi I DPR juga menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 13 calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Periode 2021-2026. Di era derasnya arus disinformasi, RRI diharapkan bisa menjadi sumber informasi kredibel bagi masyarakat.

Selanjutnya, Komisi I menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada bulan November 2021.

Saat uji kelayakan dan kepatutan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan visi misinya. “Berangkat dari vision *statement*, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI sebagai

kita atau bagian dari mereka,” ujar Andika.

Jenderal Andika mengatakan misi yang akan ia usung harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Secara umum ada tiga hal, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia.

Misi tersebut dijabarkan dalam beberapa fokus, yang terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Pertama, mengembalikan tugas-tugas TNI sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Sebab, menurut dia, selama ini TNI sudah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya dinilai masih banyak kelemahan.

Kedua, meningkatkan operasi pengamanan perbatasan. Ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI. Keempat, peningkatan kemampuan

siber, terutama untuk intelijen, khususnya di daerah – daerah yang saat ini ada gangguan keamanan maupun konflik. Kelima, peningkatan interoperabilitas di antara angkatan darat, laut dan udara harus terus menerus dan semakin disatukan.

Keenam, penguatan integrasi dan penataan organisasi pun menurut Andika masih banyak ruang perbaikan di sana-sini. Ketujuh, penguatan diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Sesudah disetujui DPR melalui Rapat Paripurna, Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 November 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kendati rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan sebelum memasuki masa pensiun, Komisi I DPR optimis Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional. • ann/es



# Komisi II

## Pastikan Pemilu Tetap pada 2024

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.



“KITA sudah bentuk tim kerja antara Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP sudah menetapkan dalam tim kerja itu bahwa Pemilu

legislatif dan presiden itu tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak

itu 27 November 2024,” ungkapnya kepada awak media di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Doli memundurkan Pemilu ke 2027, harus dengan melakukan amendemen UUD 1945. “Itu kan nggak semudah itu, jadi tidak bisa diubah dengan UU saja, karena kan UUD 45 itu disebutkan bahwa masa jabatan satu periode pemerintahan itu kan 5 tahun, jadi kalau misalkan

kita mau memperpanjang dan mau memundurkan Pemilu, ya harus dimulai dengan amendemen UUD 45,” jelasnya.

### KOMPLEKSITAS PEMILU 2024 SANGAT TINGGI

Ahmad Doli Kurnia menegaskan, tahun 2024 itu adalah tahun politik. Sepanjang tahun 2024 itu akan digelar beberapa event besar politik di tanah air. Doli mengatakan, penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mempunyai tingkat kerumitan dan kompleksitas yang sangat tinggi.

“Karena tahun 2024 menjadi tahun yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi, maka disepakati untuk mencoba menyusun sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 itu akan seperti apa? dengan tingkat kerumitan yang seperti apa? Sehingga dengan kita



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Ketua KPU RI Ilham Saputra. Foto: Eno/nvl

mengetahui tingkat kerumitan dan kompleksitas itu kita bisa mengurainya dari awal dan kita cari solusinya,” tutur Doli dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, awal September lalu.

Ia menyatakan, hal itulah yang menjadi latar belakang dibentuknya Tim Kerja Bersama. Dalam waktu satu bulan setengah sampai dua bulan, Tim Kerja Bersama ini, dikatakan Doli telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua Pimpinan Komisi II dan Kapoksi hadir dalam beberapa kali pertemuan.

“Tim Kerja Bersama sudah selesai merumuskan beberapa hal dan sudah pernah disampaikan ke publik terkait tanggal, kapan dimulai, tetapi masih dalam keputusan tim. Keputusan akhir yang secara khusus akan terjadi dalam rapat kerja resmi antara Komisi II dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan juga

penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP RI),” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

### PILKADA SERENTAK 2020 PERLU DIEVALUASI

Mencermati pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI menilai masih perlu dilakukan evaluasi. Diantaranya, masih terdapatnya pelanggaran dan sengketa Pilkada, masih adanya indikasi politik uang, masih ditemukan permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), pelanggaran netralitas ASN, Polri/TNI, dan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara Pemilu.

“Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada Serentak tahun 2020 diatas Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020,” ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,

awal tahun 2021 lalu.

Politisi Fraksi Golkar itu juga menyampaikan rasa bela sungkawa kepada para petugas dan aparat yang gugur dalam melakukan tugasnya. “Pilkada ini diharapkan menghasilkan Kepala Daerah yang bisa sungguh-sungguh bekerja memajukan daerahnya pada saat dia memimpin lima tahun ke depan,” tutup Doli.

### GELAR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN OMBUDSMAN

Komisi II DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 18 calon Anggota Ombudsman RI periode 2021 - 2026. Ada 18 nama calon Anggota Ombudsman yang diajukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, DPR RI melalui Komisi II DPR RI segera



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kiri) saat konferensi pers terkait fit and proper test terhadap 18 calon Anggota Ombudsman RI periode 2021 - 2026. di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Foto: Andri/nvl

menindaklanjuti dengan melakukan fit and proper test untuk memilih 9 orang dari 18 calon Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 tersebut.

### PERGANTIAN PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menetapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Junimart Girsang menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI menggantikan posisi rekan satu partainya Arif Wibowo.

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi II, Junimart berharap keberadaan dirinya bisa ikut memperkuat kinerja dan sinergitas bersama dengan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II lainnya dalam menjalankan tugas dan amanah dengan sungguh-sungguh sebagai wakil rakyat.

### TRANSFORMASI DATA AKAN TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan, transformasi data pelayanan publik dari analog ke digital diyakini akan membawa peningkatan kualitas pelayanan, terlebih dalam mengatasi permasalahan data ganda di tengah masyarakat.

“Kita berharap RUU Pelayanan Publik dari analog ke digital segera direalisasikan, maka dengan sistem digitalisasi data, kita meyakini republik Indonesia bisa berjalan secara mantap begitu juga halnya digitalisasi data akan memudahkan setiap masyarakat dapat terlayani dari semua hal,” ucap Junimart.

### SELEKSI CASN HARUS DIAUDIT

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di seluruh Indonesia harus diaudit. Seruan ini disampaikan menyusul temuan kecurangan seleksi CASN di Buol, Sulawesi Tengah dengan modus remote access. Ini jadi sorotan publik dan Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mendesak pemerintah

melakukan investigasi dan audit forensik digital atas sistem IT seleksi CASN. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme tes seleksi CASN. Selain itu, Luqman juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi hukuman berat.

“Saya minta agar mereka dijatuhi hukuman yang berat. Baik hukuman disiplin pegawai maupun pidana. Praktik kecurangan ini bukan hanya mencoreng integritas BKN dan KemenPAN-RB, tapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional,” tandas politisi PKB tersebut baru-baru ini.

### SISTEM MERIT BELUM OBJEKTIF DITERAPKAN

Sistem merit yang diterapkan dalam menilai kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai masih belum objektif sepenuhnya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menilai, unsur subjektif selalu muncul tak terhindarkan,

baik karena faktor kedekatan, kekerabatan, maupun politik.

Seperti diketahui, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan penerapan sistem ini untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dan kompeten berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Komisi ASN (KASN) yang ditugasi untuk memonitor sistem merit ini, menurut Syamsurizal, tidak bisa sepenuhnya dilakukan mengingat jumlah PNS jutaan orang jumlahnya. KASN tidak mungkin melihat dari dekat prestasi para PNS untuk promosi jabatan. “Untuk kasus di daerah, para PNS mungkin akan bergantung pada kedekatan politiknya dengan kepala daerah. Jadi, sistem merit tidak benar-benar murni diterapkan,” tuturnya.

• dep/es



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Erman/NVI

## Komisi III

# Kompak Tegakkan Supremasi Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi III DPR RI bekerja secara kompak dan konsisten pada tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Mitra kerja Komisi III terdiri dari seluruh lembaga pemerintahan yang bertugas pada ruang lingkup hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan.



**PADA** ruang lingkup penegakan hukum, Komisi III bersama dengan Pemerintah tetap berupaya membahas

penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif.

Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu saat ini Komisi III bersama dengan Pemerintah masih melakukan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan bahwa Revisi KUHP bertujuan untuk menjamin prinsip-prinsip keadilan restoratif, yakni keadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali dan tidak hanya terfokus pada pemberian hukum kepada pelaku

kejahatan, tetapi juga untuk menjamin pemulihan bagi korban yang terkena dampak kejahatan. Dia mengungkapkan, Komisi III masih membicarakan naskah akademik dan draf revisi KUHP setelah memperoleh koreksi dari masyarakat sipil dan membenahi kedua berkas tersebut.

"Kami meminta beberapa teman masyarakat sipil untuk menjadi *proofreader* untuk memberikan masukan-masukan atas naskah akademik dan draf revisi KUHP yang disiapkan oleh DPR," jelas Arsul saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum Terkait Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif' awal November 2021. Menurutnya revisi KUHP bukan merupakan perubahan atau amendemen, melainkan penggantian dari KUHP yang sudah ada. Akan tetapi, apabila terdapat norma-norma KUHP yang tidak bermasalah, norma tersebut juga akan tercantum di dalam KUHP yang baru. Arsul juga mengatakan, bahwa DPR akan menginisiasi KUHP, bahkan saat ini telah menyiapkan naskah akademik dan draf perubahannya. "Pada tahun depan, mestinya kami juga membahas RUU perubahan atau penggantian hukum acara pidana," kata legislator dari Jawa Tengah X itu.

Ia menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi inisiasi RKUHP oleh DPR adalah kesulitan pemerintah dalam menemukan satu kata atau satu suara dalam lingkup rumpun kekuasaan pemerintahan ketika akan menyusun naskah akademik dan draf perubahannya. Menurutnya kesulitan dalam menemukan satu kata memungkinkan untuk terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan antara Polisi dan Kejaksaan, perbedaan pandangan antara Kejaksaan dan KPK, juga perbedaan pandangan dengan berbagai lembaga lainnya.

### AWASI KINERJA PENJAGA KEAMANAN NEGARA

Polisi adalah pranata umum sipil yang berlaku sebagai penjaga ketertiban



Anggota Komisi III DPR RI  
Arsul Sani. Foto: Jaka/mvl





Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto: Andri/mf

dan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, kinerja Kepolisian diawasi oleh Komisi III. Herman Hery saat masih mengemban tugas sebagai Ketua Komisi III DPR RI, berharap agar Kepolisian kembali pada khittahnya sebagai institusi yang berasal dan bekerja untuk masyarakat. Saat acara Bhayangkara Mural Festival 2021, Herman meminta agar Polri terus melakukan perbaikan institusi. Dia pun mendukung penguatan sistem pengawasan internal di institusi Polri, agar masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang.

“Selain kegiatan simbolis seperti festival mural, Kapolri tentu harus memastikan semua jajaran di bawahnya turut bergerak ke arah perubahan yang sama. Hal ini sudah terlihat dengan tindakan tegas sejumlah pimpinan kepolisian di daerah terhadap anggota yang nakal dan ini mesti terus dilakukan hingga akhirnya masyarakat bisa melihat bahwa Polri betul-betul berubah menjadi lebih baik,” papar Herman akhir Oktober 2021.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mengapresiasi cara Kapolri yang

telah menunjukkan bahwa Polri harus menjadi institusi yang justru berperan aktif menjamin kebebasan berekspresi yang merupakan amanah konstitusi. Dia berharap seluruh jajaran kepolisian dapat membaca sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang selalu berorientasi pada kepentingan publik serta terciptanya keamanan dan penegakan hukum.

Lebih dari itu Herman berharap, perbaikan yang hendak dicapai oleh Kapolri ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. “Momentum ini harus dipakai oleh Polri untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar masalah-masalah serupa tidak terulang ke depannya. Komisi III DPR RI tentu saja mendukung setiap upaya perbaikan yang digagas oleh Polri,” tuturnya.

Tak hanya itu, kepada masyarakat Herman berharap agar terus aktif memberikan kritik yang konstruktif bagi kepolisian. “Seperti saya katakan, festival mural ini menjadi cara Kapolri memperlihatkan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal arah perubahan di Polri ini

dan tetap pro aktif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap Polri,” kata Anggota Dewan asal Ende, Nusa Tenggara Timur ini.

### **PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS SINERGI**

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali mendorong agar upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejagung seorang diri. Menurutnya, Kejagung harus terus bekerja sama dengan institusi penegak hukum lain seperti KPK dan Polri.

“Permasalahan negeri ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, tidak bicara ego sektoral. Ini pemberantasan korupsi kerja berbarengan menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita tidak bisa menutup institusi lain seperti KPK. Hari ini semua institusi, KPK, Polri, dan Kejagung sedang berbenah diri, kita harap ke depan semakin baik dan semakin bersinergi,” papar Ahmad Ali awal November 2021.

Dia pun memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) agar memburu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara



Foto bersama usai penetapan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menggantikan Herman Hery. Foto: jaka/ntv

hingga triliunan rupiah. Seperti kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), hingga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ahmad Ali juga meyakini Kejagung pasti menang menghadapi perlawanan koruptor dengan konsisten pada integritas penegakan hukum. “Apresiasi terus berbenah kemudian menjadikan kejaksaan harapan masyarakat untuk beri keadilan untuk masyarakat. Ini suatu berita bagus dan berharap Kejagung tidak berpuas diri dengan itu,” ujarnya.

Ahmad Ali menambahkan Kejagung tidak boleh takut menghadapi potensi serangan balik yang dilakukan koruptor dalam menangani kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Menurutnya, para penyidik di Kejagung harus menjaga integritas agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan semakin baik di hari mendatang. “Saya percaya, Kejagung bisa dan sudah terbukti beberapa kasus besar mereka tangani. Kami harap kasus besar ke depan masih ada kemudian segera diselesaikan,” tutur politisi Fraksi Partai NasDem itu.

### PERGANTIAN PIMPINAN KOMISI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus memimpin rapat pergantian Ketua Komisi III DPR RI. Pergantian tersebut atas dasar Surat dari Fraksi PDI-Perjuangan perihal perubahan penugasan anggotanya pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Pimpinan Komisi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR, maka saya akan menanyakan, apakah pergantian Ketua Komisi III DPR RI dari unsur Fraksi PDI-Perjuangan yang semula saudara Herman Hery, Anggota A238, digantikan saudara Bambang Wuryanto, Anggota A184, dapat disetujui?” tanya Lodewijk saat memimpin rapat dari meja Pimpinan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Usai meresmikan pelantikan Ketua Komisi III yang baru, Lodewijk pun mengucapkan selamat kepada Ketua Komisi III DPR RI yang baru yang akrab disapa Bambang Pacul itu, dan berterima kasih kepada Herman Hery yang telah mengemban tugas sebagai Ketua Komisi III dengan baik selama dua tahun ini.

“Kami atas nama pribadi dan Pimpinan DPR RI menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Bambang Wuryanto yang telah dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi III. Semoga Tuhan YME selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian khususnya Pimpinan Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas untuk bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu pula kepada saudara Herman Hery, selamat bertugas di AKD yang baru,” papar Lodewijk.

Usai resmi dilantik, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan akan mengemban tugas dengan sebaik mungkin dengan pengalaman yang telah dia punya. Dia mengatakan, meskipun dia tidak punya latar belakang studi di bidang hukum, tapi dia percaya para Anggota Komisi III pasti akan membimbing dan membantu dalam bertugas.

“Tentu nanti akan banyak membantu, sebagai sahabat pasti akan membantu. Penugasan ini akan kami jalani dengan pengalaman yang sudah didapat,” ujar Bambang.

Dia juga memberikan kesempatan kepada Herman Hery untuk menyampaikan sambutan di hadapan Anggota Komisi III DPR RI. Herman pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI lintas fraksi, yang selama dua tahun dia memimpin telah bekerja sama dengan solid mengemban tugas dan fungsi DPR guna kemaslahatan bangsa, negara, dan konstituen.

“Saya sangat berterima kasih, Ketua yang baru Pak Bambang Pacul mengizinkan saya untuk bicara di sini. Sebagai seorang politisi tentu siap ditugaskan ke mana saja. Saya menjunjung tinggi loyalitas penugasan dari partai. Saya berterima kasih kepada teman-teman Komisi III lintas fraksi. Betul kita berbeda partai, tetapi selama dua tahun lebih saya memimpin di Komisi III, kita sudah bergandengan tangan bersama-sama untuk membawa misi tugas DPR bagi kemaslahatan bangsa dan konstituen kita,” papar Herman.

● eko/es



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bersama para Anggota Komisi IV DPR RI melepaskan benih ikan. Foto: Ariel/mvl

## Komisi IV

# Komitmen Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pelik

SEIRING menanti tahun berganti, Indonesia dipercaya mampu berjuang lebih baik meski masih dilanda pandemi Covid-19. Sejumlah kebijakan diterbitkan dan diawasi pelaksanaannya guna mempertahankan sekaligus memperbaiki ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia pada masa pelik ini.



### BERDASARKAN

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2021, pangan dinilai sebagai kebutuhan dasar manusia paling utama

yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sehingga dijamin dalam

UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkan kesediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan baik di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

Tidak bisa dimaknai secara picik, pangan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan

air. Memahami pangan tidak akan ada tanpa keselarasan sikap laku manusia dengan kelestarian alam maka keseimbangan menjadi vital.

Membawa semangat tersebut, Komisi IV DPR RI konsisten menjalankan tugas dan fungsi kedewanan pada lingkup bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan. Beberapa kebijakan yang menjadi target mitra kerja memperoleh apresiasi, kritik, dan masukan. Ragam tanggapan dan tindak Komisi IV DPR RI bermuara demi menjaga Indonesia dari kerusakan yang masif.

### LINDUNGI SDA HAYATI DAN EKOSISTEM

Melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP), dan Kementerian Pertanian (Kementan), Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE). Dirinya menilai UU tersebut tidak efektif melindungi sumber daya alam Indonesia.

“Saya maunya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang umurnya sudah 31 tahun dapat selesai tahun ini,” tegas Sudin.

Terhitung hingga kini, Indonesia mengalami peningkatan bencana yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan. Hal ini mengakibatkan alam semakin rusak sehingga banjir, kebakaran hutan, hingga longsor terjadi di berbagai daerah. Berangkat dari fenomena ini, dari sudut pandang kebijakan, Komisi IV DPR RI bersepakat meminta revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 karena dianggap tidak mampu melindungi alam.

Sepakat dengan Sudin, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menekankan revisi UU ini harus

menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hayati agar tetap lestari, selaras, serasi, seimbang, namun tetap memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Tanpa mengesampingkan sisi perekonomian rakyat, dirinya menguraikan tiga titik tekan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya yakni upaya perlindungan, upaya melakukan pengawasan, dan upaya melakukan tindakan yang bersifat hukum, baik berupa denda maupun pidana.

“Bahkan saya sudah mewacanakan, bagi mereka yang melakukan pelanggaran ancaman hukuman pidananya saya usulkan pidana seumur hidup. Karena uang bisa diganti tetapi sumber daya hayati dan ekosistem kalau sudah mengalami kehancuran tidak akan bisa diganti oleh apapun,” pungkasnya.

#### EVALUASI PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH

Sebagai salah satu proyek strategis yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, baik *food estate* yang

**INDONESIA  
MENGALAMI  
PENINGKATAN  
BENCANA YANG  
DISEBABKAN  
OLEH EKSPLOITASI  
BERLEBIHAN. HAL  
INI MENGAKIBATKAN  
ALAM SEMAKIN RUSAK  
SEHINGGA BANJIR,  
KEBAKARAN HUTAN,  
HINGGA LONGSOR  
TERJADI DI BERBAGAI  
DAERAH.**

dilaksanakan oleh Kementan dan *shrimp estate* yang dilaksanakan oleh KKP menjadi perhatian bagi Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta evaluasi program dan kegiatan *food estate*.

“Padahal Komisi IV DPR RI kurang menyetujui kegiatan *food estate* karena dinilai belum jelas *output*-nya harus dievaluasi apabila berdampak pada kerugian negara,” terang Politisi Fraksi PKB itu. Ia pun menjelaskan Komisi IV DPR RI menerima pengaduan terkait masalah bantuan benih dan bibit *food estate*.

Dimana, benih dan bibit yang diberikan dianggap kurang berkualitas. Selain itu, spesifikasi yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal, benih dan bibit merupakan faktor produksi yang penting dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas.

Senada dengan Anggia, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV. Foto:Eno/nvl



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunker Komisi IV meninjau Gudang Bulog. Foto: Arief/mvi

meminta *food estate* dievaluasi kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seharusnya program *food estate* ini menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Pun, seharusnya program ini memang sudah diamankan oleh UU untuk mewujudkan ketersediaan pangan.

Soal *shrimp estate*, ia menekankan KKP perlu dikaji kembali. Baginya, akan lebih baik melaksanakan program-program pembangunan yang berskala kecil dan menengah untuk masyarakat terutama nelayan. Hal ini penting agar kebijakan itu bisa langsung segera dirasakan manfaatnya.

“Seharusnya KKP ini memiliki program-program yang afirmatif karena sampai saat ini nilai tukar nelayan belum juga signifikan untuk bisa meningkat,” terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menambahkan,

dibandingkan KKP membuat kebijakan kawasan *shrimp estate* di banyak tempat, akan lebih baik melaksanakan pembudidayaan yang disesuaikan dengan kultur budidaya masyarakat setempat. “Ya jadi kalau orang sudah biasa bikin lobster di situ, kampung

tenggiri, ya kita *push* anggarannya. Tapi kita belum melihat dukungan anggaran di situ,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.

### DUKUNG BADAN PANGAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021, Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Terdorong oleh tujuan memangkas rantai birokrasi antarlembaga urusan pangan, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Bapanas bergerak cepat untuk bekerja.

Sebagai lembaga pangan yang paling strategis, ia ingin Bapanas bisa mampu memerankan diri mengintegrasikan pengelolaan pangan nasional yang tersebar ke berbagai instansi seperti Kementan, BULOG, BUMN Pangan dan Kemendag dapat diintegrasikan semaksimal mungkin.

“Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan/ atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif. Itu mengapa Bapanas harus cepat bergerak dan bekerja.” tandasnya. ● ts/es



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Arief/Jaka

## Komisi V

# Dorong Pemerintah **Prioritaskan Pembangunan Bagi Rakyat**



Pimpinan Komisi V DPR RI. Foto: Arief/mvi

Komisi V DPR RI mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi V DPR RI secara fisik dan virtual dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Namun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Ditjen Perumahan atas capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik dalam tahun anggaran 2020. Sembari, sambung Ridwan, pihaknya terus mendorong pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun anggaran 2021.



**SELANJUTNYA,** Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Perumahan agar dalam melakukan *refocusing* dan realokasi belanja program/

kegiatan tahun anggaran 2021 tetap mengutamakan alokasi program padat karya tunai (rumah swadaya) yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat

“Terhadap program Ditjen Perumahan di tahun anggaran 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp 463,64 miliar (5,86 persen dari pagu anggaran) dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan sebesar Rp 364,93 miliar (56,70 persen dari pagu anggaran), Komisi V meminta Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar mengambil langkah strategis, sehingga kedepannya tidak terulang kembali,” tandas Ridwan.

### **DORONG KENAikan ANGGARAN KEMENDES PDTT**

Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di tahun 2022. Hal itu disebabkan pagu indikatif kementerian tersebut dinilai masih

kurang untuk memaksimalkan program dan kegiatan lembaganya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajaran mengatakan, Komisi V DPR RI memahami jumlah pagu indikatif Kemendes PDTT tahun anggaran 2022 hanya sekitar Rp 3,1 triliun. “Komisi V DPR RI bersama Kemendes akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat,” ujar Lasarus di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemendes PDTT memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan. Terkait hal itu, Komisi V DPR

RI meminta Kemendes PDTT fokus pada *output* prioritas kementerannya dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Kemendes PDTT juga diminta agar dapat pula fokus pada program yang dapat mengoptimalkan pemerataan pembangunan di daerah. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan transformasi dan paradigma transmigrasi yang berjalan dengan baik, serta memperhatikan tenaga pendamping desa yang kompeten dan profesional.

### **NASKAH RUU JALAN DIBAWA KE PARIPURNA**

RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan akan mengatur tentang hal-hal krusial berkaitan dengan peningkatan kondisi jalan. Terutama, dalam mengatasi disparitas antara kondisi jalan daerah dengan jalan nasional. Pengaturan tentang perbaikan jalan daerah nantinya



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menandatangani persetujuan RUU Jalan untuk dibahas di tingkat II. Foto: Arief/ivi



Fraksi Partai Gerindra Komisi V DPR RI menyerahkan pandangan mini fraksi atas RUU Jalan kepada Menteri PUPR. Foto: Arief/NWI

dapat diambil pemerintah pusat manakala pemerintah daerah tidak mampu lagi melakukan perbaikan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus usai memimpin Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Menhub, Mendagri, Menkeu, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri Desa PDTT dan Menkumham terkait Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Presiden dan Pengambilan Keputusan Pada Akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Rabu (1/12/2021).

Dalam pembahasan RUU Jalan tak kalah pentingnya adalah pengaturan jalan tol. Terutama, sambung Lasarus, jalan tol yang habis masa konsesi nantinya dapat dikelola oleh pemerintah atau dikembalikan ke jalan bebas hambatan dengan prioritas kepentingan rakyat menjadi hal utama.

Seperti diketahui telah berlangsung rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Menhub, Mendagri, Menkeu, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri Desa PDTT dan Menkumham. Kesembilan Fraksi yakni Fraksi PDI-P, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-Demokrat, F-PKS, F-PAN, F-PPP menyampaikan pendapat akhir mini sikap akhir Fraksi. Seluruh

Fraksi menyetujui naskah RUU Jalan untuk kemudian nantinya dibawa dan diputuskan di Tingkat II yakni Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

Hasil tersebut merupakan implementasi tindak lanjut usai Senin (24/5/2021) beberapa waktu lalu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kala itu dalam rapat yang dihadiri Menteri PUPR, Kemenhub, Kemendes-PDPT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Komisi V menyepakati usulan Presiden terhadap pembahasan RUU Tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lasarus menjelaskan, selanjutnya pembicaraan tingkat I akan dilakukan.

### ANTISIPASI MOBILITAS MASYARAKAT JELANG NATARU

Selain itu, berkaitan dengan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Pemerintah diingatkan agar mempersiapkan skema dan kebijakan strategis dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Pematangan konsep pembatasan mobilitas masyarakat harus dilakukan jelang Nataru, mengingat kejadian sebelumnya pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Hai itu ditekankan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP (BASARNAS), membahas kesiapan pemerintah mengantisipasi peningkatan penumpang jelang Nataru 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Kelalaian yang terjadi pada momen tersebut telah membuat peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang signifikan. Bahkan, puncaknya terjadi pasca Lebaran 2021 lalu terjadi lonjakan Covid yang luar biasa. Fenomena tersebut harus diakui sebagai penyebab terjadinya peningkatan kasus akibat dari pelaksanaan arus mudik dan arus balik Nataru 2020 maupun libur Lebaran 2021 yang lalu.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Kemenhub sebagai petugas pelaksana juga perlu menyiapkan skema guna mengantisipasi lonjakan kasus. Apalagi, saat ini muncul varian baru Covid-19 yakni Omicron. "Saya rasa ini juga menjadi lampu kuning untuk kita melakukan persiapan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam menghadapi pengendalian jelang libur Nataru tahun 2021," tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. ● pun/es



## Komisi VI

# Berupaya Selesaikan Persoalan yang Membelit BUMN

Komisi VI DPR RI memiliki peran dan tanggung jawab yang luar biasa sepanjang tahun 2021. Ragam persoalan publik yang bersinggungan dengan kerja-kerja BUMN terus diupayakan jalan keluarnya.



DI Tahun 2021 ini, selain masih berkuat dengan penanganan pandemi, Komisi VI juga di tahun ini dituntut untuk bersama mitra menyelesaikan

persoalan yang tidak mudah: kasus garuda, kenaikan harga minyak goreng, alih biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hingga percepatan penyelesaian RUU krusial, seperti RUU BUMN. Meski demikian, Komisi VI tetap berupaya menyelesaikannya dengan cepat dan terukur sesuai dengan prioritas dan keputusan politik yang telah disepakati bersama.

Dalam penanganan pandemi, Komisi VI berupaya keras mendesak pemerintah untuk menurunkan harga PCR atau antigen dan menghindari profitisasi BUMN Farmasi dalam program vaksinasi. Beberapa desakan Komisi VI dinilai berhasil, contohnya tarif PCR/antigen semakin terjangkau dan rencana vaksinasi berbayar hanya dipersempit untuk sektor swasta yang

relatif tidak terpuak secara ekonomi selama pandemi (vaksin gotong-royong).

“Saya minta, jangan gara-gara vaksin individu (gotong-royong) ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam beberapa waktu lalu.

Belum lama ini, Komisi VI mendesak harga tes PCR/antigen tersebut harus terjangkau sejauh mungkin, sebab dengan semakin rendah harganya maka dapat memiliki efek domino berikutnya. Di antaranya adalah menggerakkan aktivitas ekonomi, transportasi, dan pariwisata.

Harga terkini tes PCR adalah Rp 275 ribu untuk di Pulau Jawa-Bali, dan Rp 300 ribu untuk di luar Pulau Jawa-Bali.

Sedangkan, untuk harga antigen batas tertingginya adalah Rp 99 ribu untuk di Pulau Jawa-Bali, dan Rp 10.900 untuk di luar Pulau Jawa Bali. Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Kemenkes HK.02.02/I/3065/2021 per 1 September 2021 silam.

Di sisi lain, untukantisipasi lonjakan kasus yang bisa saja terjadi saat musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 mendatang, Komisi VI juga telah



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.  
Foto: Oj/Nvi

meminta kepada empat BUMN Farmasi agar menambah produksi obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima berharap dengan antisipasi tersebut, maka kasus kelangkaan seperti yang terjadi sebelumnya, tidak akan terulang kembali.

“Kita antisipasi, bagaimana ketersediaan entah itu antivirusnya, vitaminnya, dan yang lainnya agar dipersiapkan sekarang. Pengalaman yang kemarin menjadi sesuatu yang lebih antisipatif terhadap kondisi saat ini, kalau memang itu nanti gelombang ketiga pandemi muncul,” ujar Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

### CARI SOLUSI SELAMATKAN GARUDA

Di luar pengawasan soal pandemi tersebut, Komisi VI sepanjang 2021 ini juga *concern* menjaga martabat bangsa agar maskapai nasional Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak pailit karena utangnya yang menggunung. Saking *concern*-nya, hampir semua Anggota Komisi IV menyoroti soal

## TENTU, PERSETUJUAN DIBERIKAN DENGAN CATATAN PT KAI SEBAGAI SALAH SATU ANGGOTA KONSORSIUM PROYEK KERETA CEPAT, MELAKUKAN AUDIT TERLEBIH DAHULU MENGAPA TERJADI PEMBENGGKAKAN BIAYA

liabilitas (utang dan kewajiban) *flag carrier* ini yang mencapai Rp 140 triliun per November 2021.

Menurut paparan dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, aset Garuda mencapai Rp99 triliun (kurs Rp

14.200/US\$). Namun, dengan liabilitas di angka tersebut, maka terdapat ekuitas negatif setara Rp 40 triliun. Liabilitas ini disebabkan karena tiap bulan di tahun 2021, penambahan utang Garuda mencapai hampir Rp1 triliun.

Menghadapi persoalan ini, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Komisi VI untuk mengurai sekaligus mencari solusi bagi permasalahan Garuda. Sebab, biaya sewa 50 pesawat yang lebih mahal dari *lessor* untuk jenis Boeing 737 pada 2014, diduga menjadi biang penumpukan utang seperti saat ini.

Dengan adanya tim Panja yang mengaudit internal manajemen Garuda ini, Komisi VI berharap dapatkan informasi yang lengkap dan akuntabel maskapai pelat merah ini. “Mengingat BUMN yang seharusnya memberikan keuntungan kepada negara, tetapi jadinya malah merugikan negara,” ujar Politisi PKS tersebut.

Dalam rangka audit internal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman pun menyebut BPK dan BPKP perlu masuk ke dalam persoalan ini. Proses auditnya pun, nilai Mahfudz, harus dilakukan secara transparan. Hal ini perlu dilakukan sebab pemerintah aktif memberikan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) tiap tahunnya, dan Komisi VI memiliki andil dalam memberikan persetujuan besarnya.

“Kita tidak lagi bisa anggap Garuda sakit karena dampak pandemi COVID-19. Justru kita harus menganggap pandemi telah membuka bobroknya BUMN penerbangan kita itu yang selama ini tertutup atau sengaja ditutup-tutupi,” jelas Mahfudz.

### PERTANYAKAN PEMBANGUNAN KCBC DENGAN APBN

Selain persoalan Garuda Indonesia, Komisi VI juga aktif mempertanyakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang alih pembiayaan: dari yang bersifat *Business to Business* (B to B) menjadi ada keterlibatan dana pemerintah melalui APBN. Persetujuan



Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: OjiNM

**PENETAPAN UU INI MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM YANG SANGAT MENDESAK SAAT INI. MUNCULNYA UU INI MENJAWAB KEPUTUSAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT.**

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Foto: Oj/Nwi



penggunaan APBN untuk pembiayaan KCJB ini sebagaimana tertuang dalam aturan baru, yaitu Perpres Nomor 93 Tahun 2021, revisi dari Perpres Nomor 107 Tahun 2015.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan pihaknya telah menyetujui adanya PMN terhadap proyek kerja sama dengan negara Tiongkok tersebut. Hal itu lantaran adanya pembengkakan biaya proyek tersebut sebesar 1,9 miliar dolar AS, atau dari 6,08 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS. Meski demikian, Andre menegaskan, Komisi VI bersama pemerintah menyepakati bantuan PMN tersebut harus didahului dengan audit investigasi pembengkakan biaya ini.

“Tentu, persetujuan diberikan dengan catatan PT KAI sebagai salah satu anggota konsorsium proyek kereta cepat, melakukan audit terlebih dahulu mengapa terjadi pembengkakan biaya,” jelas Andre.

### **BAHAS RUU BUMN**

Selain dari sisi pengawasan, Komisi VI juga sedang mempercepat beberapa pembahasan RUU di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah RUU mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang sedang dialami oleh

Komisi VI DPR RI dalam RUU BUMN tersebut adalah mengenai penggunaan prinsip *Business Judgement Rule*.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menjabarkan dalam prinsip *Business Judgement Rule*, akan mengatur soal status kekayaan negara yang sudah dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan negara atau daerah, termasuk perusahaan negara dan BUMN, masuk keuangan negara atau tidak.

Nusron menjelaskan, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam bentuk penyertaan ke dalam perusahaan negara, itu masuk kategori keuangan negara. Karena masuk keuangan negara maka, padanya ada pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga, BUMN menjadi objek pemeriksaan dalam arti domain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Politisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, jika masuk keuangan negara maka BUMN rentan oleh intervensi negara. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ada campur tangan politik dalam setiap kebijakannya yang tentu saja sulit dielakkan.

“Akan rentan dalam konteks menjadi intervensi negara. Selama dia itu masih

dalam kendala masuk rezim keuangan negara, di situ pasti akan ada campur tangan kekuatan politik, tidak terelakkan. Satu-satunya jalan untuk mengeluarkan daripada kepentingan politik itu, supaya BUMN itu murni berjalan sesuai dengan konteks mekanisme pasar maka harus ditarik supaya BUMN itu masuk ke dalam rezim kategori *business judgement rule*,” ungkapnya.

Selain RUU BUMN, Komisi VI juga telah menyetujui RUU ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* (Peretujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau RUU PMSE untuk dibahas dalam pembahasan tingkat II atau dalam paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.

“Penetapan UU ini merupakan salah satu upaya penguatan sistem hukum yang sangat mendesak saat ini. Munculnya uu ini menjawab keputusan dan perkembangan masyarakat. Pasalnya, transaksi melalui sistem elektronik telah menjadi kegiatan umum di seluruh dunia, bahkan jual beli menggunakan sistem elektronik bisa dilakukan secara lintas negara,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. ●  
rdn/es



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto melihat langsung Motor Listrik yang dikembangkan oleh P3TKEBTKE/P3Tek Kementerian ESDM di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Foto: Andri

## Komisi VII Maksimal Bekerja meski Pandemi

Masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, DPR RI terutama Komisi VII DPR RI tetap melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang diamanahkan rakyat melalui undang-undang. Baik fungsi legislasi, pengawasan maupun fungsi anggaran. Berikut sekelumit dari sekian banyak tugas yang dijalankan Komisi VII DPR RI sepanjang tahun 2021.



**SEPANJANG** tahun 2021 setidaknya, Komisi VII DPR RI sudah tiga kali melakukan pergantian pimpinan. Selain

karena pertimbangan tertentu dari masing-masing fraksi yang menjadi suatu hal yang wajar, namun pastinya pergantian pimpinan di sebuah komisi sejatinya dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan tugas Komisi VII DPR RI.

Pertama pergantian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerinda, yakni Bambang Hariyadi yang resmi menggantikan rekan separtainya,

Ramson Siagian. Sebagai Informasi, sebelum digantikan oleh Bambang, Ramson juga menggantikan rekan separtai, Gus Irawan Pasaribu yang ditugaskan di Komisi lainnya.

Selanjutnya, pergantian pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alex Noerdin yang digantikan oleh Maman Abdurrahman pada Senin (28/6). Kemudian, pertengahan November lalu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel resmi menetapkan Dony Maryadi Oekon sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menggantikan Bambang Wuryanto yang ditugaskan memimpin Komisi III DPR RI.

### KRITISI INSIDEN KEBAKARAN KILANG MINYAK PERTAMINA

Berbagai pengawasan, kritikan arahan dan masukan dilakukan Komisi VII DPR RI untuk seluruh mitra kerjanya dari berbagai bidang, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian, serta berbagai Lembaga/badan lainnya.

Setidaknya tiga peristiwa kebakaran kilang minyak terjadi dalam tahun 2021 ini. Pertama kebakaran Kilang Minyak milik PT Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021 silam. Kedua, kebakaran yang terjadi di Kilang Minyak Cilacap pada Jumat malam 11 Juni 2021. Alih-alih mengambil pelajaran dalam kedua insiden kebakaran kilang minyak, peristiwa serupa malah kembali terjadi untuk yang ketiga kalinya. Tepatnya terjadi pada kilang minyak milik PT Pertamina RU IV Cilacap Tangki 36T-102 yang berisi Peralite sebanyak 31 ribu Kilo liter.

Hal tersebut tentu mengundang kekecewaan DPR RI, Khususnya Komisi VII DPR RI yang notabene membidangi masalah energi dan sumber daya mineral. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto misalnya. Ia berharap kebakaran beberapa kilang minyak tersebut tidak boleh dipandang remeh. Pertamina harus sungguh-sungguh menyikapi kejadian

ini. Ia menilai, Pertamina lalai dalam melaksanakan standar operasional dan prosedur yang sudah ditentukan.

Pengalaman Kebakaran Kilang Minyak Pertama tidak dijadikan pelajaran untuk menghindari peristiwa yang sama di kilang lainnya. Politisi dapil Banten III ini berharap Pertamina meninjau ulang efektivitas standar operasional prosedur yang ada. Termasuk dibuatnya program perawatan dan pencegahan kebakaran kilang secara sungguh-sungguh, agar tidak terjadi musibah serupa di kemudian hari.

### PERTANYAKAN KELANJUTAN PIPANISASI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG

Komisi VII DPR RI mempertanyakan kelanjutan proyek Pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pasalnya proyek tersebut menjadi salah satu proyek strategis nasional dan sudah ditetapkan pemenang lelangnya sejak tahun 2006 silam.

Saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, di Gedung DPR RI, Senin (15/3/2021), Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menilai salah satu proyek strategis nasional ini dapat dikatakan mangkrak sejak

15 tahun silam. Padahal gas menjadi salah satu *resources clean energy* yang sangat dibutuhkan saat ini. Untuk itulah pembangunan infrastruktur menjadi penunjang adanya transmisi energy, memang sangat dibutuhkan masyarakat.

Politisi Fraksi PKB ini berharap ketika proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang ini dialihkan ke PT Bakrie Brother, yang notabene merupakan pemenang lelang kedua setelah PT Rekayasa Industri (Rekind), maka hal tersebut harus benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai target.

### APRESIASI PENGAMBILALIHAN BLOK ROKAN

Komisi VII DPR RI mengapresiasi alih Kelola Blok Rokan ke PT Pertamina dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) pada 9 Agustus 2021 lalu. Dimana Blok Migas tersebut akan dikelola oleh anak Pertamina yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).



Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari. Foto: Ojji/mvi

Meski demikian Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengingatkan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan PHR setelah menerima alih kelola Blok Rokan. Pertama proses transfer data penelitian dan pengembangan enhanced oil recovery (EOR) dari Chevron ke PHR. Menurutnya itu sangat penting untuk meningkatkan produksi minyak Blok Rokan.

“Tanpa hasil riset itu, PHR bisa kesulitan untuk meningkatkan produksi minyak Blok Rokan. Pada prinsipnya, EOR membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Bahkan terkadang waktu 10 tahun pun tidak cukup,” ujar Kardaya Oktober lalu.

Alih kelola sumur tua seperti Blok Rokan bukan hanya soal transfer data, *knowledge* dan SDM yang mulus, namun perlu juga tambahan investasi, pengetahuan dan teknologi baru. Bila tidak, maka produktivitas *lifting* akan terus berkurang (*decline*) secara alamiah. Padahal, Indonesia memiliki semangat untuk meningkatkan *lifting* minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030.

### PERJUANGKAN ANGGARAN MITRA KERJA UNTUK PROGRAM RAKYAT

Dalam menjalankan fungsi anggaran, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memaparkan bahwa Komisi VII DPR menyetujui asumsi dasar makro sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada RAPBN tahun 2022. Selain itu Komisi VII DPR RI turut menyepakati penambahan pagu indikatif Kementerian ESDM di tahun depan.

Untuk asumsi dasar makro sektor ESDM tahun depan meliputi besaran Indonesia Crude Price (ICP), *lifting* migas, volume BBM dan LPG bersubsidi, subsidi tetap minyak solar (Gasoil 48), dan subsidi listrik. Beberapa rinciannya antara lain, ICP disepakati 55-70 dollar AS per barel, sedangkan *lifting* migas 1.736-1.950 ribu *barrel oil equivalent per day* (BOEPD).

“Lalu Komisi VII juga menyetujui peningkatan pagu Indikatif RABPN TA 2022 Kementerian ESDM menjadi sebesar Rp6,89 triliun,” terang Sugeng saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Juni lalu. Dimana, pemerintah sebelumnya mengusulkan pagu anggaran indikatif kementerian itu hanya sebesar Rp5,04 triliun.

Sugeng menjelaskan, kenaikan pagu anggaran indikatif tersebut, penyerapannya akan didominasi dan diprioritaskan kepada masyarakat. Ia mencontohkan soal program elektrifikasi nasional yang menyasar banyak rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram mempertanyakan realisasi kuota elpiji 3 kg yang masih kurang dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton.

“Terkait realisasi APBN dan *outlook* untuk tahun 2021. Volume BBM dan Elpiji bersubsidi 3 kg dalam APBN, seharusnya ada 7,5 juta metrik ton, tapi realisasinya hanya 7,15 juta metrik ton,” tanya Arkanata dalam dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung DPR RI.

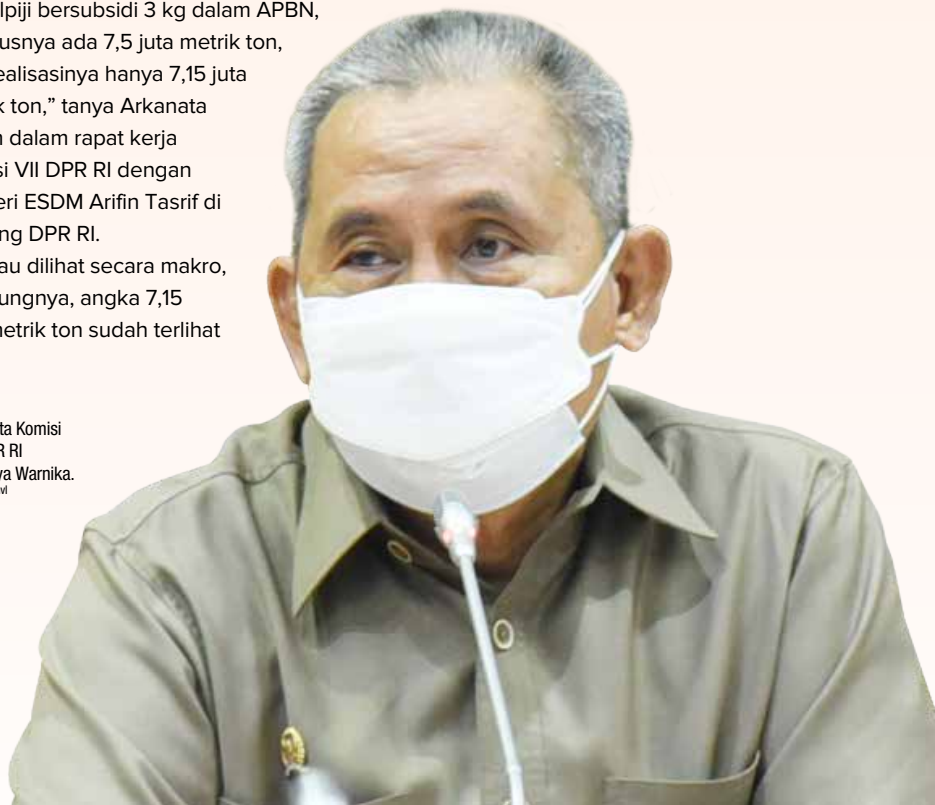
Kalau dilihat secara makro, sambungnya, angka 7,15 juta metrik ton sudah terlihat

bagus, karena sudah merealisasikan anggaran sebesar 95 persen. Namun ketika melihat pemanfaatannya di lapangan, akan sangat banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan elpiji 3 kg lagi. Pertanyaannya, *outlook-outlook* yang direncanakan di Kementerian ESDM akan didistribusikan ke mana saja kuota 7,15 juta metrik ton itu. Serta sisa atau kekurangannya sebesar 350 ribu metrik ton itu ke mana saja.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Mengingat kekurangan kuota elpiji 3 kg sebesar 350 ribu metrik ton tersebut sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dilipinya, Kalimantan Utara yang populasinya mencapai 700 ribu orang dan berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Ini menjadi aspirasi saya, agar ketika *outlook* 7,15 juta metrik ton elpiji 3 kg itu direalisasikan, juga harus mempertimbangkan daerah-daerah perbatasan atau daerah 3T seperti dilipinya saya Kaltara,” pungkasnya. ● ayu/es

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika.  
Foto: Ojivml



## Komisi VIII

# Beri Perhatian Khusus pada Pelaksanaan Ibadah Haji

Kerajaan Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah asal Indonesia. Merespon hal itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama segera merevisi besaran biaya umrah pada masa pandemi, dalam hal ini Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag mengkaji kembali KMA Nomor 777 Tahun 2020 yang mengatur biaya umrah pada masa pandemi.

Desember mendatang. Mereka sebelumnya tertunda umrah karena pandemi. Yaqut menerangkan pemberangkatan 18 ribu jemaah umrah itu akan dilakoni setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, *General Authority of Civil Aviation (GACA)* membuka pintu kedatangan bagi WNI.

Di sisi lain, Yaqut mengatakan pihaknya juga akan mengkaji ulang biaya umrah di masa pandemi. Kini, Kemenag tengah melakukan revisi KMA Nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi

Covid-19, dan KMA Nomor 177 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi masa pandemi. “Sebagaimana disampaikan pimpinan rapat bahwa biaya umrah ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jemaah,” kata Yaqut.

Ketua Komisi VIII  
Yandri Susanto.  
Foto: Gerald/nvl



“**PERLU** segera dikaji ulang apakah akan tetap sama atau kah akan terjadi perubahan biaya. Satu hal yang perlu menjadi catatan Komisi

kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut sedikitnya 18.752 jemaah umrah Indonesia siap diberangkatkan pada

VIII DPR RI adalah agar penetapan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umrah tidak terlalu memberatkan calon jemaah,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Ke depan, tambah politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pihaknya dan pemerintah akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 untuk membahas komponen biaya dan



## UMRAH DIBUKA LAGI, PEMERINTAH DIMINTA JAMIN PROKES

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengapresiasi atas dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan protokol kesehatan (prokes) bagi calon jemaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penularan virus Covid-19.

“(Pembukaan umrah) itu kabar baik bagi kita semua. Kendati demikian, penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya,” ujar Bukhori dalam keterangan persnya kepada Parlemen, Minggu (10/10/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi membawa konsekuensi terhadap pembengkakan biaya, salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jemaah apabila ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan. Merespons hal itu, Bukhori menilai, pemerintah juga perlu menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jemaah dari segi biaya.

“Selain dari segi kesehatan, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, khususnya untuk kebutuhan karantina. Karena itu saya mendorong pemerintah memastikan penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan para jemaah kita,” tegasnya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jemaah umrah Indonesia sepulang dari

Tanah Suci. Pasalnya, lanjut dia, kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahan kasus di sejumlah negara masih terus terjadi.

“Maka, ketika sampai di Tanah Air, juga harus ada protokol yang jelas dan tidak merepotkan dengan tetap menyadari bahwa saat ini pandemi belum usai. Ini semata-mata demi mengantisipasi risiko terjadinya gelombang ketiga pandemi di Indonesia sekaligus memelihara keselamatan bersama,” pesan Bukhori.



Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori. Foto: Jaka/nvi

## REFOCUSING ANGGARAN JANGAN GANGGU KINERJA KEMENAG

Kementerian Agama (Kemenag) melakukan refocusing anggaran sebesar Rp2 triliun pada tahun 2021 ini untuk penanganan Covid-19. Refocusing anggaran tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, pertama Rp485,54 miliar untuk pelaksanaan program Covid-19, kedua Rp718,72 miliar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ketiga Rp385,46 miliar untuk mendukung penanganan pandemi dan empat untuk menyukseskan PPKM Rp399,91 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, refocusing anggaran di Kemenag diharapkan tidak mengganggu kinerja Kementerian Agama. Ia menilai, instansi tersebut memiliki beban kerja yang cukup berat.

“Refocusing Rp2 triliun itu sangat besar Pak Menteri, tetapi ini guna mendukung penanganan Covid-19 di negara kita, untuk itu saya pertanyakan program apa yang dibuat Kemenag

agar kinerjanya tetap dipertahankan. Mengingat beban kerja Kemenag itu cukup berat,” ungkap Yandri saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Lebih lanjut politisi PAN ini menyampaikan, Komisi VIII DPR RI akan berupaya maksimal agar Kementerian Agama dapat memperoleh tambahan anggaran hingga menyamai anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kita akan upayakan kepada Kemenkeu agar Kemenag ditambahkan anggarannya hingga sama dengan Kemendikbud,” harapnya.

## BEDA SIKAP SOAL KELEMBAGAAN BNPB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan perbedaan pandangan antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah soal kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



yang akan diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.

“Dalam serangkaian rapat Panja (RUU Penanggulangan Bencana) memang belum ditemukan titik temu antara Panja dimana saya kebetulan ketuanya, dengan Panja Pemerintah mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maupun anggaran penanggulangan bencana. Kalau yang lain (pasal-pasal) saya kira semua sudah menemukan kesepakatan,” ujar Ace saat Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial dan Komisi II DPD RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Ace menyampaikan dalam pembahasan dengan Panja Pemerintah maupun Komisi VIII, disebutkan secara eksplisit dalam revisi UU versi pemerintah soal kelembagaan BNPB hanya disebut badan. Sementara dalam UU sebelumnya Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB disebutkan secara eksplisit. “Tentu di dalam DIM versi Komisi VIII, kami justru mempertegas soal BNPB. Nah untuk saat ini soal kelembagaan ini, sesungguhnya belum menemukan titik temu”, sambung Ace.

Ace juga menyampaikan jika RUU Penanggulangan Bencana tak kunjung menemukan titik temu, maka RUU ini nantinya bisa di-drop dari pembahasan. “Kita diberikan waktu hanya dalam satu masa sidang lagi. Jika di dalam satu masa sidang ini, artinya nanti bulan Desember, kita masih belum bisa menyelesaikan UU ini, maka UU ini akan di-drop. Pemerintah bersikeras bahwa BNPB tidak perlu disebutkan. Di Komisi VIII sesuai dengan konsep kami, ingin menyebutkan BNPB. Bahkan kami ingin memperkuat kelembagaannya”, terangnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga mengatakan yang menjadi isu krusial dalam RUU Penanggulangan Bencana bukan saja terkait BNPB. Tetapi menurutnya, RUU ini juga mengubah paradigma penanggulangan bencana

yang lebih berorientasi pada mitigasi bencana.

“Kita menginginkan bahwa perlu adanya proses literasi kebencanaan. Kedua kita mempertegas kembali soal perlunya dokumen analisis kebencanaan di dalam tata ruang dan membangun kita. Karena kita tidak ingin bahwa proses pembangunan kita tidak memperhatikan aspek kebencanaan,” papar Ace.

“Saya kira kesimpulannya dari rapat ini kita memberikan kesempatan kembali kepada Kementerian Sosial sebagai wakil Pemerintah untuk meminta pandangan dari Presiden dan Kementerian terkait tentang penyelenggaraan kebencanaan. Dan sikap kami Komisi VIII tentu kami harus berpegang kepada prinsip atau DIM yang sudah kami miliki,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

#### **MENSOS HARUS UPDATE DATA BANSOS**

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI menyepakati agar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan akurasi data penerima manfaat dari berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos tahun 2021. Mensos juga diminta melibatkan pemerintah daerah dalam

proses pendataan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto ini mengamanatkan agar Risma memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merestui perubahan iklim potensi bencana dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai yang disalurkan kepada masyarakat.

Di sisi lain Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Ridha menyampaikan, anggaran Kementerian Sosial jangan sampai dikurangi, dia beralasan karena Kemensos mengemban tanggung jawab yang besar. Menurutnya Kemensos memiliki program yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan dampak Covid-19.

“Silakan bila ada pengurangan anggaran, tapi tidak di Kemensos. Saat ini Mensos dan jajaran sedang bekerja keras, dan oleh karenanya patut diapresiasi,” papar Ali Ridha saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait Pembahasan RKA K/L TA 2022, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021). ● tn/es



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Eot,Eno,Jaka/mv

## Komisi IX

# Fokus Selesaikan Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Sudah dua tahun ini sejak ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia awal Tahun 2020 lalu, Komisi IX DPR RI berjabaku menyelesaikan berbagai masalah. Meski disibukkan dengan kasus Covid-19, sektor kesehatan seperti masalah *stunting* dan ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian para wakil rakyat yang duduk di Komisi IX.



**KETUA** Komisi IX DPR RI Felly E. Runtuwene mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk

mencegah *stunting*. Dimana, *stunting* merupakan kondisi anak yang masih berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki tinggi badan di bawah rata-rata, salah satu sebabnya adalah kebersihan lingkungan dan asupan gizi yang kurang.

“Pemerintah berupaya optimal menurunkan angka *stunting* sebesar 2,5 persen setiap tahunnya supaya di akhir pemerintahan Pak Jokowi tinggal 14 persen,” ujar Felly. Ia juga menyampaikan beberapa upaya untuk mencegah *stunting*, yakni dengan makan makanan bergizi dan terus menjaga agar tubuh sehat dan bugar.

Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan

sekitar agar tetap bersih dan sehat, semisal pengelolaan sampah hingga ketersediaan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus). “Jangan membuang sampah sembarangan, tempatkanlah di lokasi yang seharusnya. Selain itu jangan buang sampah di sungai, apalagi sebagian masyarakat memanfaatkan air sungai ini untuk mencuci atau mandi,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Ketua Komisi IX DPR RI  
Felly Estelita Runtuwene.  
Foto: Jaka/rvi

Nihayatul Wafiroh mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting untuk mempercepat sosialisasi dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

### MINTA PEMERINTAH REALISASIKAN JKP

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan





Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat Rapat Kerja dengan Kepala BKKBN dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes. Foto: Mentari/mv

## PROGRAM JKP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG JKP, KOMISI IX MEMINTA BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN DUA POIN PENTING

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun demikian, Komisi IX mengingatkan realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, April lalu.

Ansory menyatakan dalam pelaksanaan Program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP, Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan dua poin penting. "Poin pertama, Komisi IX mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan perbaikan infrastruktur," tutur politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Termasuk, imbuh Ansory, *database* kepesertaan sehingga Program JKP dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta. Poin kedua, sambung Ansory, Komisi

IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan *time table* integrasi data kepesertaan dan kepastian dilaksanakannya program JKP.

### MINTA BPJS KETENAGAKERJAAN PERLUAS KEPESERTAAN

Komisi IX DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan promosi dan sosialisasi program kepesertaan secara masif dan intensif guna meningkatkan perluasan kepesertaan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Maret lalu.

"Kami meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Dewas menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan (RKAT) tahun 2021 dan *roadmap* tentang perluasan kepesertaan program jaminan sosial termasuk pada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informasi dan peserta non aktif," sambung Ansory.

Selain meningkatkan perluasan peserta BPJS bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX juga meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyalarsan data kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan.

"Serta menyempurnakan pedoman investasi dalam rangka meningkatkan keamanan seluruh investasi yang ditempatkan secara variatif di berbagai lembaga keuangan dan dunia usaha dan Melaporkan rencana strategis program investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021," ucapnya.

### MINTA PEMERINTAH TINGKATKAN KIE

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satgas Penangan Covid-19 untuk terus meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan 3M, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan mengingat situasi pandemi di dunia, termasuk di Indonesia yang masih belum pulih.

“Selain itu, kami (Komisi IX) juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut dan udara serta meningkatkan test *Whole Genome Sequencing* (WGS) yang tersedia secara merata di seluruh wilayah, katanya saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Kepala Badan POM, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Direktur Utama PT Biofarma di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, November lalu.

“Kemudian, kami juga meminta pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan terkait testing dan tracing melalui pemeriksaan NAAT atau antigen yang masuk dalam sistem NAR, meningkatkan transparansi penetapan harga tes PCR yang dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” lanjut Charles, seraya meminta pemerintah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk kecukupan perbekalan kesehatan untuk penanganan Covid-19.

#### DUKUNG ‘TESTING’ DAN VAKSINASI DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah dan perguruan tinggi. Sebab kebijakan PTM tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian/lembaga.

“Sekarang kan sudah ada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini perlu diperkuat, sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru,



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris). Foto: Mentari/nvl

**GURU, ANAK DIDIK, DAN STAF ADMINISTRASI DITES MINIMAL SEKALI ATAU DUA KALI DALAM DUA MINGGU. AGAR TIDAK TERLALU MAHAL DAN TIDAK MEMAKAN WAKTU LAMA, MAKA TESTING DILAKUKAN DENGAN RAPID ANTIGEN.**

dan tenaga pendukung lainnya,” ujar Saleh.

Politisi PAN ini mengakui pelaksanaan PTM tidak mudah. Sudah semestinya dipastikan bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah

dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

“Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik,” kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. Tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan. “Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliah sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanaan vaksinasi nasional,” imbuh Saleh. • rmm/sf



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyerahkan laporan Panja Peta Jalan Pendidikan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Azka/rvi

## Komisi X

# Suarakan Aspirasi Bidang Pendidikan, Wisata dan Olahraga

Awal tahun 2021, desakan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah mulai disuarakan. Para siswa merasa belajar di rumah kurang menyenangkan. Mereka lebih suka bersekolah, bertemu guru dan teman-teman.

saya rasa layak dipertimbangkan untuk kembali dibuka secara bertahap, baik itu konser musik, pertunjukan teater, maupun kesenian tradisional,” seru Huda Maret lalu

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan hasil survei Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bahwa 62,5 persen siswa tidak menganggap belajar di rumah itu menyenangkan.

“Banyak sekali siswa yang meminta sekolah untuk dibuka kembali. Ini cukup mengejutkan, karena ternyata siswa tidak menikmati belajar di rumah dan justru tidak sabar ingin masuk kembali ke sekolah,” kata Hetifah.



**KETUA** Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung kegiatan sekolah kembali dibuka dan juga pertunjukan seni budaya.

Dukungan pembukaan ini seiring program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan dan terus menurunnya kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir.

“Kami mendukung kembali dibukanya sekolah dan bergerakaknya industri kreatif di Tanah Air seiring tingginya antusiasme vaksinasi Covid-19. Seni pertunjukan

**PJP UNTUK REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang ingin mencetak SDM unggul harus mampu menyesuaikan dengan tren revolusi industri 4.0. Semua itu hanya bisa dicapai lewat pendidikan. Pendidikan vokasi jadi sasaran dalam konteks ini. Diharapkan paradigma vokasi yang baru bisa bertransformasi secara keilmuan.

Hetifah mengingatkan hal ini Februari 2021 lalu. PJP 2020-2035 memang telah mengubah paradigma pendidikan nasional. Perubahan paradigma yang diharapkan adalah transformasi keilmuan terutama di sektor pendidikan vokasi yang berselaras dan bersinergi dengan tantangan Revolusi Industri 4.0.

**HONORER 10 TAHUN JADI PPPK**

Para guru honorer yang sudah mengabdikan 10 tahun, idealnya bisa langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, bila masih memungkinkan bisa dilanjutkan diangkat menjadi guru PNS.

Para guru yang sudah diangkat menjadi PPPK harus diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai kompetensi sebelum menjadi PNS. Begitu pula para tenaga kependidikan yang sudah mengabdikan lama, bisa diprioritaskan menjadi PNS atau setidaknya PPPK. "Hal ini sebagai penghargaan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun," imbuh Hetifah, Mei lalu.

**AFIRMASI GURU HONORER**

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan rekrutmen guru honorer di Tanah Air. Padahal, persoalan pelik guru honorer telah berlangsung lama. Namun, belum ada kebijakan afirmasi terhadap kesejahteraan maupun status guru honorer. Ini disampaikan Huda Juni lalu.

"Kebijakan menyangkut guru belum sesuai harapan dan cita-cita Komisi X. Sebab belum ada kebijakan komprehensif yang dikeluarkan pemerintah untuk menuntaskan

persoalan guru yang ada di seluruh Indonesia, baik guru honorer di sekolah swasta maupun negeri," kata Anggota F-PKB DPR itu.

**GURU PPPK BELUM TERIMA SK**

Guru honorer di daerah yang sudah lulus menjadi PPPK mencapai 34.317 guru. Hanya saja hingga Juni 2021 belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian sesuai standar PPPK. Ini diungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Persoalan ini sempat jadi sorotan.

"Masing-masing pejabat di kementerian dan lembaga harus memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penyelesaian formulasi percepatan terhadap 34.317 sisa guru PPPK untuk mendapatkan SK dan penggajian," kata Fikri.

Salah satu persoalan teknis di daerah adalah pejabat pembina kepegawaian (PPK) ada yang meninggal dan belum ada gantinya. Akibatnya 111 SK PPPK daerah tertahan dan belum terima gaji. Kemendagri, harap Fikri, harus bertanggung jawab atas situasi tersebut.

**NASIB GURU HONORER SWASTA**

Para guru honorer di sekolah-sekolah swasta harus mendapat perhatian sama dengan para honorer di sekolah negeri. Anggota Komisi X DPR Putra

Nababan menyampaikan ini Maret 2021 lalu. Kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri selalu ditutup dengan para honorer swasta.

Para guru swasta pun menuntut segera diangkat menjadi guru PPPK yang tahun 2021 ini sudah dialokasikan sebanyak 1 juta guru PPPK di seluruh Indonesia. "Kekurangan guru di daerah termasuk DKI Jakarta sangat dibantu guru-guru swasta. Mereka minta diperhatikan," ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

**NATURALISASI ATLET**

Atlet asing yang dinaturalisasi hendaknya tidak mengesampingkan perhatian pada atlet-atlet lokal. Atlet naturalisasi tidak perlu mendapat hak istimewa. Semuanya harus diperlakukan sama. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Juli 2021. Para atlet lokal juga banyak yang berprestasi tinggi dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Saat itu ada tiga atlet basket yang dinaturalisasi atas nama Dame Diagne, Marques Terrell

Wakil Ketua  
Komisi X DPR RI  
Hetifah Sjaifudian.  
Foto: Azka/mtl



Bolden, dan Serigne Modou Kane. Di satu sisi Hetifah bisa memahami tujuan naturalisasi ini, yaitu meningkatkan prestasi Indonesia pada turnamen internasional Viva Asia Cup 2021 dan Viva World Cup 2023. Tapi di sisi lain, para atlet lokal banyak yang terdampak Covid-19. Kata Hetifah, jangan sampai naturalisasi atlet baru ini mengecilkan perasaan para atlet lokal.

### APRESIASI TRADISI EMAS CABOR BULUTANGKIS

Bangga dan terharu menyaksikan pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih emas olimpiade pada final bulutangkis di Tokyo, Jepang. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi capaian gemilang itu. Agustus lalu, ia mengatakan, ini perjuangan berat mewujudkan tradisi emas dari cabang olahraga bulutangkis.

“Dari era Susi Susanti, Indonesia sudah langganan memenangkan berbagai kejuaraan bulutangkis. Tentu saja atlet berprestasi tidak dicetak secara kilat, melainkan perjuangan bertahun-tahun dengan dukungan berbagai pihak. Saya acungkan jempol untuk sinergi PBSI, KONI, Kemenpora, serta CSR berbagai swasta yang mendukung prestasi atlet kita,” ungkapnya.

### TREN DESA WISATA

Desa wisata dan perkampungan tematik jadi tren pengembangan wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diimbau menggali strategi wisata alternatif tersebut di tengah pandemi Covid-19. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng menyampaikan hal ini awal September lalu.

“Tren kecenderungan wisatawan saat ini mengalami perubahan dari wisata massa ke arah wisata alternatif. Perubahan ini mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal dengan tujuan meningkatkan wawasan dan petualangan,” ujar Agustina.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Azka/NWI

### RUU SKN DIBAHAS

Rancangan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) mulai dibahas Komisi X DPR, September 2021. Isu-isu krusial diinventarisir dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menjelaskan, ada 861 DIM dalam RUU SKN ini. Di antara isu tersebut adalah soal kelembagaan KONI dan KOI, serta pembentukan lembaga arbitrase olahraga.

“Dari rincian DIM tersebut, ada beberapa isu krusial yang kita sandingkan dengan DPR. Soal KONI dan KOI, dalam pandangan DPR, ketua KONI tidak rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik, namun tidak ada sanksi. KOI dipimpin oleh ketua selaku *ex officio* menteri,” jelas Dede.

### RUU PP DIBAHAS

September 2021, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi (RUU PP) Komisi X DPR RI masih terus bekerja melakukan pendalaman atas semua isu menyangkut RUU tersebut. Kali ini, Panja mengundang para pakar hukum untuk menyerap berbagai masukan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, Panja sedang membahas urgensi pengaturan

praktik psikologi ini dalam bentuk UU dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lain. RUU PP masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 Nomor 20 melalui Rapat Paripurna 23 Maret 2021 lalu. Komisi X DPR melalui surat Pimpinan DPR RI, 19 Januari 2021, mendapat penugasan untuk membahas RUU ini.

### LADI JADI SOROTAN

Tim Thomas Cup Indonesia jadi juara. Tapi ada yang janggal ketika prosesi penyerahan piala dan medali. Bendera Merah Putih tak berkibar dan lagu Indonesia Raya tak terdengar. Ternyata itu adalah sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) bagi Indonesia, lantaran tak kunjung memberi sampel tes doping para atlet Indonesia di ajang PON Papua kemarin.

Adalah Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang bertanggung jawab soal ini. LADI telah lalai mengurus hasil sampel dan tidak komunikatif dengan WADA. Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, September lalu, menilai sanksi yang diberikan kepada Indonesia merupakan salah satu wujud ketidakmaksimalan dukungan bagi para olahragawan yang berjuang mengibarkan merah putih di forum internasional. ● mh/es



Komisi XI DPR RI foto bersama dengan Menteri Keuangan usai membahas usulan perubahan skema PPnBM. Foto: mri/rvi

## Komisi XI Sambut Regulasi Pajak yang Baru

Komisi XI DPR RI selama tahun 2021 tetap konsisten menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya. Pada tahun ini bersama pemerintah Komisi XI telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi regulasi perpajakan yang baru. Selain itu, Komisi XI DPR RI masih membahas RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan mengawasi jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi masih berlangsung.



**KETUA** Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, UU HPP diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih

adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar. Seperti pilar penguatan administrasi perpajakan, untuk memberikan kepastian hukum dan menguatkan pelaksanaan kesepakatan internasional.

“Lalu program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, untuk mendorong dan memberikan

kesempatan kepada Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan,” terang Dito.

UU HPP juga berupaya memperluas basis pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan untuk mengantisipasi perkembangan transaksi ekonomi. Tak lupa, regulasi tersebut,



kata Dito, menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Adapun Komisi XI DPR RI, telah mendengarkan berbagai masukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilakukan secara terbuka dengan berbagai pihak terkait substansi beleid baru itu.

Dito menguraikan, UU HPP memuat 6 kelompok materi utama yang terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang mengubah beberapa ketentuan UU perpajakan, seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, Pogram Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dan pengenaan pajak karbon. Ia juga memaparkan, UU HPP memuat aturan mengenai: integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP hingga asistensi penagihan pajak global yang bersifat resiprokal.

Sedangkan pengaturan PPh dilakukan perbaikan pengaturan lapisan tarif PPh OP yang berpihak pada lapisan penghasilan terendah (Rp 60 juta) dan kenaikan tarif menjadi 35 persen untuk kelompok atas, penambahan threshold peredaran bruto tidak kena pajak untuk UMKM, pengaturan ulang tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk mendukung penguatan basis pajak, pengaturan tentang penyusutan dan amortisasi.

Sementara terkait pengaturan PPN, UU ini berkomitmen keberpihakan pada masyarakat bawah dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan dan jasa pelayanan sosial, skema PPN Final untuk sektor tertentu, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan 2025.

#### BAHAS RUU HKPD

Sementara itu, Komisi XI DPR RI juga masih menggodok RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dengan telah memperoleh penjelasan dari pemerintah. Komisi XI DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam

## RUU HKPD BAGIAN PENTING DARI MEREALISASIKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA. DIMANA DALAM KONSTIUSI DITERANGKAN BAHWA NEGARA AKAN MELINDUNGI SEGENAP MASYARAKAT SERTA BERUPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAANNYA.

rapat kerja kali ini, fraksi-fraksi di Komisi XI bersama Komite IV DPD RI turut menyampaikan pandangannya atas penjelasan pemerintah itu.

Dito mengatakan RUU HKPD ini merupakan penyempurnaan dari regulasi hubungan keuangan pusat dengan daerah yang sebelumnya telah ada. Menurutnya, dalam rentang satu dasawarsa telah terjadi dinamika perkembangan yang signifikan juga memunculkan berbagai tantangan dalam memunculkan desentralisasi fiskal, efektivitas belanja daerah, tingginya belanja infrastruktur di daerah dan sebagainya.

Maka berbagai upaya perbaikan telah dilaksanakan secara parsial seperti UU APBN dimana ada alokasi DAU untuk infrastruktur dan DAK berbasis usulan. “Untuk menjawab tantangan yang ada perlu disusun kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi belanja dan peningkatan pelayanan publik melalui sinergi demi mendukung target pembangunan nasional ataupun peningkatan kapasitas perpajakan daerah melalui penyusunan RUU ini,” terang Dito.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati juga turut menegaskan bahwa RUU HKPD bagian penting dari merealisasikan tujuan negara Indonesia. Dimana dalam konstitusi diterangkan bahwa negara akan melindungi segenap masyarakat serta berupaya memajukan kesejahteraan.



Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: mri/mvl

Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pasal 18A UUD 1945 dimana hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah diatur secara adil dan selaras. “Rancangan regulasi ini akan menyempurnakan hubungan keuangan yang ada, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” terang Anis.

Lebih lanjut ia bilang, pembahasan ke depan perlu mengakomodasi terkait otonomi daerah dan desentralisasi dengan mengedepankan aspek keadilan dan kesejahteraan rakyat. “Serta perlu evaluasi terkait pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama dua dekade terakhir dalam pembahasan RUU ini,” ujar Legislator Dapil DKI Jakarta I itu.

#### PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH

Dalam kesempatan yang berbeda Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai upaya pemberdayaan UMKM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara pada

masa pandemi sudah berjalan dengan baik. Namun ada hal-hal yang bisa dikritisi dan bahkan masih bisa didorong untuk bisa meningkat lagi.

“Tidak ada alasan menurun lagi pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang, karena kondisi pemulihan ekonomi di masa Covid-19 sudah semakin baik, dengan semakin masifnya program vaksinasi,” ungkap Agun. Lebih lanjut, Agun menyampaikan, data angka-angka, data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang disajikan dalam pertemuan dengan para mitra kerja di Sumatera Utara sesungguhnya belum menampakkan keadilan, apalagi pemerataan.

“Yang kami maksudkan bukan tidak percaya data, tapi mungkin benar adanya. Misalnya data tentang KUR, data tentang UMKM. Sebetulnya data-data itu masih jauh secara kuantitatif jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan, itu maksud kami,” ungkapnya.

Agun menekankan, pengawasan yang dilakukan Komisi XI DPR RI ke daerah untuk lebih mendekati kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan sektor keuangan, perbankan, perekonomian untuk lebih

Anggota Komisi XI  
Agun Gunandjar Sudarsa.  
Foto: man/tvi

**“TIDAK ADA ALASAN  
MENURUN LAGI  
PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI MASA-  
MASA MENDATANG,  
KARENA KONDISI  
PEMULIHAN EKONOMI  
DI MASA COVID-19  
SUDAH SEMAKIN BAIK,  
DENGAN SEMAKIN  
MASIFNYA PROGRAM  
VAKSINASI**

mendekatkan dengan subjek, objek yang ingin dilihat, yaitu rakyat di daerahnya.

“Menjadi pertanyaan kita, pertumbuhan yang tinggi tidak serta merta menjamin kesenjangan berkurang, karena faktanya bisa saja pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan, kebodohan, bahkan jurang yang kaya dan miskin semakin yang tinggi. Akibat dari kebijakan pengalokasian seluruh sumber daya keuangan dan ekonomi tidak tersebar merata dari Sabang sampai Merauke,” sebut Agun. ● ah/es

# Baleg DPR RI Komitmen Tuntaskan Prolegnas dengan Legislasi Berkualitas

DPR RI akan berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Sekalipun dengan adanya pembatasan-pembatasan rapat, seluruh Anggota DPR RI tetap bekerja dengan optimal. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati target 246 RUU. Kemudian ada 33 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.



**MARET** lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyempurnakan daftar Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama DPD dan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini menyetujui untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas Prioritas tahun ini.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan, Rapat Kerja ini diagendakan sebagai amanat dari keputusan Rapat Bamus yang masih menunda penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021. “Mengingat perkembangan dan perubahan arah politik legislasi yang terjadi khususnya yang terkait dengan keberadaan RUU tentang Pemilihan Umum dalam

Prolegnas RUU prioritas,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II selaku pengusul RUU, maka DPR

RI melalui Baleg akan menarik dan mengeluarkan revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas tahun ini.

Dalam Rapat tersebut disepakati RUU tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diusulkan oleh Pemerintah. Sehingga total rancangan regulasi yang masuk dalam Prolegnas tetap berjumlah 33 RUU.

## DESAK PEMERINTAH BENTUK BADAN PANGAN

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam mendesak pemerintah segera membentuk Lembaga Pangan Nasional yang berfungsi mengatur tata kelola pangan nasional guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia. Persoalan pangan di negara berkembang tak terkecuali di Indonesia memang masih sangat mendasar dan perlu segera diatasi.

Hal tersebut dinyatakan Ibnu ketika memimpin rapat antara Baleg DPR dengan Menteri PAN-RB, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan



Pimpinan Baleg DPR RI foto bersama dengan Menteri Hukum dan HAM usai menyetujui dikeluarkannya revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (9/3/2021). Foto: Rumi/rvi

Perikanan, serta Wakil Menteri Perdagangan pertengahan Maret lalu. Kewajiban pembentukan Lembaga Pangan tersebut pun juga menjadi hasil kesimpulan rapat ini.

“Pangan merupakan kebutuhan strategis suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Untuk itu wajib dibentuk lembaga pangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” ujar Politisi Fraksi PKB itu ketika membacakan hasil kesimpulan rapat.

Ibnu mengatakan, konsep pembentukan lembaga pangan ini menjadi wewenang pemerintah. Struktur yang terbaik harus dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan. Menurutnya, DPR akan terus memantau dan meninjau implementasi undang-undang tersebut secara berkala.

“Pembentukan badan ini *kan* kita serahkan kepada pemerintah. Bentuknya nanti seperti apa, apakah nanti *leading*-nya di Bulog atau bentuk badan sendiri. Itu terserah pemerintah. Yang penting sesuai amanat

UU-nya, Baleg akan terus melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala untuk memastikan terbentuknya lembaga pangan nasional,” tukas Ibnu.

### SEPAKATI RUU DIKDOK JADI USUL INISIATIF DPR

September lalu, Baleg DPR RI telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ketua Panja RUU Dikdok Willy Aditya mengatakan hal tersebut dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Dikdok di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Nantinya usulan UU ini akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dikdok. Sebelumnya Willy mengatakan, Baleg telah membentuk Panja dan melakukan pembahasan secara intensif pada tanggal 15, 23, dan 27 September 2021. Kemudian memutuskan untuk menyepakati beberapa hasil penyusunan ruu tersebut secara garis besar.

“Tentu spirit pertama yang ingin kita kembalikan itu mengenai sumpah dokter harus mengutamakan kemanusiaan. Kita ingin mengembalikan spirit

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Azka/ivi

**KONSEP  
PEMBENTUKAN  
LEMBAGA PANGAN INI  
MENJADI WEWENANG  
PEMERINTAH.  
STRUKTUR YANG  
TERBAIK HARUS  
DIBUAT AGAR TIDAK  
TERJADI TUMPANG  
TINDIH PENUGASAN.**

humanisme di dalam pendidikan kedokteran ini. Kemudian setelah melakukan beberapa kali RDPU dan menyerap aspirasi, kami dapatkan fakta bahwasanya dokter layanan primer merupakan kompetensi layanan primer yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan dokter dan dokter gigi juga jadi *concern* kita,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Willy juga menegaskan, dalam UU Dikdok baru, Panja menginginkan adanya afirmasi dalam bentuk alokasi dan biaya kepada dokter yang mengabdikan di daerah 3T. Menurutnya, selama ini alasan lulusan dokter-dokter menolak ditempatkan di daerah terluar adalah karena mereka tidak diberikan keberpihakan dukungan anggaran yang jelas.

“Maka kemudian kita ingin memberi afirmasi di dalam bentuk alokasi dan biaya, apakah nanti bentuknya dinas kan. Karena apa? Kalau orang ditempatkan di 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) kalau tidak ada afirmasi dan alokasi





Pimpinan Baleb DPR RI menerima pandangan mini Fraksi PKB atas RUU Dikdok, Rabu (29/9/2021). Foto: Ojhwv

mereka tidak akan mau. Jadi itu yang menjadi concern kami untuk kemudian bahkan pembentukan perguruan tinggi kedinasan ini belajar dari beberapa negara yang ada ini juga tidak menutup kemungkinan,” tandasnya.

### **WUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP RUU TPKS**

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya menegaskan, DPR RI terus berupaya merespons harapan masyarakat akan pencegahan

kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembahasan RUU TPKS yang hingga kini masih bergulir di Baleb.

“Di RUU ini, korban benar-benar menjadi perhatian kita. Korban tidak hanya dilindungi tetapi juga mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan terkait kasus kekerasan yang dialami olehnya,” kata Willy RUU TPKS berfokus terhadap korban, mengingat seberat apapun pelaku dihukum, korban tetap mendapatkan dampak kerugian yang kompleks.

DPR RI akan terus merespons kegelisahan publik terkait isu tersebut. Willy meminta masyarakat percaya bahwa DPR senantiasa berpihak terhadap korban kekerasan seksual. “Kami setia pada isu-isu yang menjadi konsen kita. Publik bisa melihat totalitas kami yang tidak hanya menjaga akan tetapi juga terus berjuang merealisasikan lahir UU perlindungan terhadap korban TPKS. Sedari awal kami sadar ini tidak akan mudah. Namun yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa,” pungkasnya. ● rmm/es

# Banggar DPR RI Imbau LPEI Bantu UMKM

Mengawali tahun 2021, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerukan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar membantu pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bentuk bantuannya bisa berupa pendampingan, pelatihan, dan kemudahan akses ekspor.



## SELAIN

memberikan pembiayaan kepada UMKM, LPEI juga memberikan pelayanan jasa konsultasi kepada

para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan penjualan di pasar

ekspor. Dengan begitu, produk UMKM Indonesia tidak saja dikenal di pasar internasional, tapi juga punya kualitas dan daya saing yang kuat.

## VAKSINASI PULIHKAN PEREKONOMIAN

Program vaksinasi yang dimulai pada Februari 2021 diharapkan ikut memulihkan perekonomian nasional. Ketua Banggar Said Abdullah,

Februari 2021, menyampaikan bahwa keberhasilan vaksinasi jadi faktor penentu program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dengan vaksinasi, tidak hanya mampu mengatasi pandemi Covid-19, tapi juga berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. "Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri dan memperkuat fundamental ekonomi. Sehingga, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang," ujar Said.

Ia lalu mengungkapkan, pada Triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga minus 5,32 persen. Tetapi, setelah itu tren pertumbuhan



Ketua Banggar DPR RI HM Said Abdullah (kanan). Foto: Rni/ivi

ekonomi terus menunjukkan angka membaik. Triwulan III 2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan triwulan IV sebesar minus 2,19 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen.

### APBN TRANSISI

Seiring panjangnya masa pandemi Covid-19 yang mengganggu keuangan negara, maka pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2020. Perppu itu mengizinkan defisit APBN bisa lebih dari 3 persen.

Dijelaskan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Maret 2021, pelebaran defisit itu berlaku selama tiga tahun (2020-2022). Inilah APBN transisi selama pandemi Covid-19. Diharapkan dengan toleransi defisit itu, perekonomian dan keuangan negara perlahan bisa sehat kembali. Tahun 2023 nanti, defisit akan kembali normal ke 3 persen dari PDB.

### KEM-PPKF 2022 HARUS AKURAT

April 2021, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk 2022 mulai disusun. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak agar perumusan desain asumsi KEM-PPKF 2022 harus akurat. Saat itu, ia melihat, perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat.

Ini, katanya, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mengalami tekanan luar biasa. Pemerintah pun diimbau membuat langkah-langkah taktis menghadapi pandemi yang belum selesai agar ekonomi nasional bisa terus berputar.

### INSENTIF PAJAK PARIWISATA

Mei 2021, Ketua Banggar Said Abdullah mendesak pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menerapkan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi

pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara belum tepat. Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” ungkap Said. Begitu pula sektor pariwisata, sepanjang pandemi masih berlangsung, wisman lebih memilih menunda bepergian.

### TAX AMNESTY TAK DIPERLUKAN

Tax Amnesty jilid II tidak diperlukan lagi. Seruan ini disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Mei 2021 lalu. Pemerintah mewacanakan ini setelah presiden mengirim surat ke DPR untuk merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Isi revisi itu mengatur penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga *tax amnesty*.

“Seharusnya pemerintah tidak lagi bicara soal *tax amnesty* jilid II, karena akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* jilid satu yang baru dilakukan 2016 lalu. Kalau tahun 2022 akan dilakukan kembali, hemat saya, bukan *tax amnesty*,” kata Said dalam konferensi pers bersama Ketua DPR dan Menkeu.

### PAJAK SEMBAKO DITOLAK

Juni 2021, muncul usulan pemerintah memajaki sembilan bahan pokok (sembako) yang selama ini jadi konsumsi masyarakat. Anggota Banggar DPR Marwan Cik Hasan menyerukan agar rakyat tak terus dipajaki. Menerapkan pajak pada sembako merupakan pengkhianatan kepada rakyat.

Negara memang membutuhkan penerimaan yang tinggi karena kebutuhan belanja yang juga tinggi. Apalagi tahun 2022, merupakan tahun terakhir pintu utang bagi pemerintah dibuka. Setelah itu (2023), defisit kembali dipatok normal. Pemerintah,

ujar Marwan, perlu mencari terobosan. Misalnya, menerapkan pajak transaksi digital. Ini lebih logis.

### COVID-19 KEMBALI MELONJAK

Banggar DPR memberi perhatian khusus atas melonjaknya kasus Covid-19 pada Juni 2021. Lonjakan ini tentu berdampak pada perekonomian nasional. Ketua Banggar DPR Said Abdullah sudah sejak lama menyerukan agar penegakan hukum atas penerapan protokol kesehatan yang ketat melibatkan aparat penegak hukum.

Hingga pertengahan Juni 2021, kasus Covid-19 mencapai 1.927.708 pasien. Menurut Said, ada yang tidak beres dengan kebijakan penanggulangan Covid-19. Ekonomi nasional pada Juni menurun seiring daya beli masyarakat yang juga menurun.

### FOKUS PADA ANGGARAN VAKSINASI

Untuk menekan angka pasien Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional, Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Juni lalu, menyerukan agar prioritas anggaran difokuskan untuk vaksinasi dan program padat karya. Banggar sudah mengalokasikan anggaran vaksinasi hingga 2022.

Pembangunan infrastruktur sebaiknya ditahan dulu. “Banggar DPR meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam pemulihan ekonomi nasional dengan jalan moderat, keseimbangan antara penguatan sektor kesehatan dan sektor ekonomi,” tandas Cucun.

### PAJAK JANGAN BEBANI MASYARAKAT

Sekali lagi, seruan agar masyarakat tak dibebani pajak datang dari parlemen. Kali ini Wakil Ketua Banggar Edhie Baskoro Yudhoyono yang mendesak hal tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada posisi yang serba salah. Satu sisi butuh pendapatan besar untuk kebutuhan belanja. Di sisi lain, penerimaan negara makin menipis.

Untuk itu, pemerintah mewacanakan pengenaan pajak sembako untuk

menggali penerimaan negara. Memajaki sembako tetap bukan pilihan tepat. “Jangan sampai masyarakat sedang susah, dibebani dengan yang lebih ekstrem lagi,” kilah Ibas.

### KONTRAKSI DI MASA PPKM

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 3 Juli-9 Agustus. Kasus Covid-19 terlihat belum menurun signifikan. Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021 sebagai dampak PPKM. Saat PPKM diterapkan, ada 27.913 kasus positif Covid-19. Kontraksi pun tak terelakkan hingga ke level 1,7-2 persen.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah, awal Agustus lalu, mendesak pemerintah agar disiplin menurunkan angka kasus Covid-19. Pada 4 Agustus lalu, kasus Covid meningkat lagi menjadi 35.867. Bila wabah Covid-19 mampu dikendalikan plus PPKM tidak diperpanjang, maka kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif di kisaran 4,7 -5,2 persen.

### KELUAR DARI RESESI

Ketua Banggar DPR Said Abdullah, awal Agustus lalu, mengapresiasi kinerja tim ekonomi dan keuangan (Ekuin) pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 mencapai 7,07 persen.

Angka tersebut cermin dari capaian angka pertumbuhan yang positif bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau *year on year* (yoy). Jadi, secara kuartalan ekonomi tumbuh 3,31 persen. “Dengan tumbuh 3,31 persen, untuk pertama kalinya perekonomian kita keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020. Pencapaian ini patut kita syukuri dan memberikan semangat bagi kita untuk memulihkan ekonomi yang diterpa pandemi Covid-19,” nilai Said.



Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI foto bersama dengan Menteri Keuangan usai rapat kerja. Foto:Rumi/nvl

### RP16 TRILIUN DANA OTSUS

Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp16 triliun untuk dialokasikan kepada Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat pada RUU APBN 2022. Anggota Banggar DPR RI Irwan, September 2021 lalu, merinci, Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp7,5 triliun dan Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8,5 triliun.

Dalam laporannya, Irwan menambahkan, pembagian alokasi Dana Otsus Papua, yaitu Rp5,7 triliun untuk Papua dan Rp2,7 triliun untuk Papua Barat. Selain itu, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp4,37 triliun. Infrastruktur DTI meliputi infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, air bersih, energi listrik, dan sanitasi lingkungan.

### BANGGAR APRESIASI PUTUSAN MK

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal *judicial review* UU No.2/2020 tentang Perppu No.1/2020, atau dikenal dengan UU Corona. Menurutnya, putusan MK ini memberikan kepastian hukum, karena bersifat final dan mengikat, sehingga menguatkan UU No.2/2020 tentang Perppu No.1/2020 secara hukum.

“Banggar DPR memberikan penghormatan, dan patuh terhadap putusan MK tersebut,” ujar Said, November lalu. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan materiil UU No.2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). • mh/es



# BURT DPR RI

## DPR Terima Penghargaan Lingkungan Ramah Disabilitas



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso didampingi Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerima penghargaan DPR RI sebagai lingkungan ramah disabilitas. Foto: Mri/Novi

DPR RI akan berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Sekalipun dengan adanya pembatasan-pembatasan rapat, seluruh Anggota DPR RI tetap bekerja dengan optimal. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati target 246 RUU. Kemudian ada 33 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.



**PADA** awal tahun 2021, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) memberikan penghargaan lingkungan ramah

disabilitas kepada DPR RI sebagai salah satu lingkungan perkantoran yang dinilai telah memberikan akses yang mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas di lingkungan Gedung DPR RI.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso yang mewakili DPR RI

didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Menurut Agung, memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas sudah merupakan tugas dari BURT dan Sekjen DPR RI.

Terlebih, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. “Tentunya dari hasil diskusi, kami akan siapkan seluruh fasilitas pendukung atau aksesibilitas untuk penyandang disabilitas,” ungkap Agung.

Lebih lanjut, meski lingkungan Gedung DPR RI dinilai sudah cukup ramah disabilitas, namun ada beberapa fasilitas yang masih perlu disiapkan untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas. Seperti akses terhadap penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu yang masih belum tersedia.

gedung-gedung di seluruh Indonesia, terhadap aksesibilitas terhadap kaum disabilitas,” harap legislator dapil Jawa Barat I ini.

### DUKUNG PERCEPATAN ‘HERD IMMUNITY’

DPR RI menyelenggarakan vaksinasi di lingkungan DPR RI sebagai upaya mendukung pemerintah untuk percepatan pembentukan kekebalan kelompok (Herd Immunity) serta mencegah kerumunan di beberapa titik di Jakarta karena antusiasme tinggi masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

“DPR ini memberikan solusi dan kesempatan kepada Anggota DPR yang belum dan tentunya para pegawai di lingkungan Setjen DPR RI agar dapat vaksin. Tentunya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin,” terang Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Dengan adanya vaksinasi di DPR ini, Agung berharap Indonesia dapat segera mencapai kekebalan komunal, yaitu 70-80 persen warganya sudah mendapatkan vaksinasi. Sehingga kehidupan masyarakat Indonesia bisa kembali normal dengan kondisi kesehatan yang lebih kuat.

“Mudah-mudahan, masyarakat Indonesia segera dapat divaksin semua. Target *herd immunity* tercapai, sehingga kekebalan tubuh rakyat Indonesia semakin kuat dan kehidupan bisa kembali normal, bukan *new normal*,” tutup legislator dapil Jawa Barat I tersebut.

### BURT DORONG JOUMPA TINGKATKAN SINERGI

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Bakri menginginkan layanan JOUMPA Airport VIP Service and Lounge bisa dikembangkan tidak hanya bagi Anggota DPR RI, melainkan juga untuk layanan komersial bagi setiap penumpang yang membutuhkan layanan dan fasilitas di Bandara.

“Diharapkan dengan adanya kerja sama yang sudah terjalin cukup lama antara DPR dengan PT Gapura Angkasa di 39 Bandara di seluruh Indonesia, kinerja dari pada layanan JOUMPA bisa lebih ditingkatkan secara paripurna kepada semua Anggota DPR RI,” ujar politisi PAN itu.

Legislator dapil Jambi ini menjelaskan, layanan JOUMPA diberikan bukan karena Anggota Dewan ingin menciptakan sesuatu yang berlebihan, namun itu memang sudah tertera dalam tata tertib DPR dimana setiap Anggota Dewan mendapatkan layanan *fast track* di bandara dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan DPR.



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ruang Pustakaloka DPR RI. Foto: Rumi/rml

Kedepan, politisi fraksi Partai Demokrat ini berharap Kompleks Parlemen dapat menjadi *role model* bagi gedung-gedung lain di seluruh Indonesia terhadap aksesibilitas yang ramah kaum disabilitas. “Ke depan, Gedung DPR dan Kompleks Parlemen ini menjadi role model bagi

Ketua BURT Agung Budi Santoso saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi di DPR RI menggunakan vaksin jenis Sinovac dengan capaian vaksinasi per harinya rata-rata sebesar 200 dosis.



Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri saat berdiskusi terkait layanan Joumpa Airport VIP Service. Foto: Runi/nvl

### HARAP SELURUH RS DI INDONESIA BERI LAYANAN PRIMA

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengungkapkan, peran dan tugas BURT meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kebijakan kerumahtanggaan, termasuk melakukan pengawasan terhadap hak-hak Anggota DPR.

“Mencermati berbagai kondisi, BURT DPR RI berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan. Bentuk pengawasannya adalah berkunjung secara langsung ke rumah sakit provider untuk memastikan pelaksanaan program Jamkestama telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang ada,” urainya.

Sesuai peraturan yang berlaku dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggota DPR RI sebagai pejabat negara (termasuk anggota keluarganya) diberikan pelayanan kesehatan

melalui mekanisme asuransi kesehatan yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Untuk itu, pemberian jaminan kesehatan ini merupakan aspek penting bagi Anggota DPR, mengingat tugas yang diembannya sangatlah besar. “Oleh karena itu, pelayanannya harus dikelola secara profesional,” tambah Novita.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua BURT Achmad Dimiyati Natakusumah mengimbau agar rumah sakit provider PT. Jasindo untuk meningkatkan pelayanannya terutama bagi Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yaitu Anggota Dewan beserta keluarganya.

“Dalam pelaksanaannya, BURT mengamati masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program Jamkestama dengan rumah sakit provider. Oleh sebab itu, BURT melakukan kunjungan langsung pada objek sebagai bentuk pengawasan,” pungkasnya.

Selain itu, lanjut Dimiyati, Jasindo melalui RS provider-nya harus dapat memastikan pelaksanaan program Jamkestama berjalan optimal. Ia juga meminta agar pelayanan terhadap peserta Jamkestama di rumah sakit-rumah sakit provider dapat tersosialisasikan dengan baik. • bia/es



**BENTUK PENGAWASANNYA ADALAH BERKUNJUNG SECARA LANGSUNG KE RUMAH SAKIT PROVIDER UNTUK MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESTAMA TELAH MEMENUHI PERATURAN DAN KETENTUAN YANG ADA.**

Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti. Foto: Erman/nvl

## BKSAP DPR RI

# Komitmen Tangani Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan global dalam beberapa tahun terakhir. Penanganan perubahan iklim memiliki dampak yang begitu luas dan masif pada kualitas kehidupan manusia dan ekonomi global.



**DALAM** forum COP26 *Parliamentary Forum on Climate Change* (Glasgow COP26) yang diselenggarakan di Skotlandia,

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berkomitmen mendorong langkah konstruktif untuk menangani perubahan iklim.

Ketua BKSAP Fadli Zon mengatakan penanganan perubahan iklim membutuhkan dukungan multipihak baik di level global maupun nasional. Parlemen, melalui

fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan *Paris Agreement*.

Dalam sesi *Advocacy*, Fadli menekankan pentingnya pembangunan ekonomi hijau atau rendah karbon dalam upaya mengurangi emisi. Dia juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tentunya parlemen berperan dalam mendorong pemerintah mewujudkan visi penggunaan energi bersih dan mencapai *Net Zero Emission*.

Fadli mengakui tidak mudah menyelesaikan isu lingkungan hidup tanpa adanya kesinambungan antara hukum sekaligus implementasi. Menurutnya, timbulnya kesenjangan antara hukum dan implementasi kebijakan penyelesaian isu lingkungan hidup diakibatkan oleh *silo approach*.



Delegasi BKSAP DPR RI berfoto bersama usai pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) dan British Group of the IPU (BGIPU). Foto: Ist/mvl

Di sesi berbeda, Anggota BKSAP Dyah Roro Esti dalam COP26 memaparkan progress pencapaian *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia dengan komitmen penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Khusus di sektor energi dan industri, menurut dia, sudah terdapat beberapa upaya dalam merealisasikan transisi energi untuk mewujudkan target NDC. Penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia menunjukkan kemajuan dengan peningkatan pemanfaatannya sebanyak empat persen per tahun.

Meski demikian, pemanfaatan ini masih harus ditingkatkan mengingat baru 2,5 persen dari total potensi EBT di Indonesia telah terealisasi, yang kini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Komisaris Low Carbon Development Indonesia (LCDI) ini juga turut menyampaikan implementasi dari *net zero emission* diprediksi mampu meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 1.8 – 2.2 juta pekerjaan baru pada tahun 2030.

Pada tahun 2022, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Pengendalian perubahan iklim akan menjadi salah satu topik inti, dan diharapkan akan ada kemajuan para negara dalam merealisasikan NDCs masing – masing.

### **AJAK PARLEMEN DUNIA DUKUNG PERCEPAT CAPAIAN SDGS,**

Sementara itu, melalui forum *The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs* yang diselenggarakan atas kerjasama DPR RI dengan *Inter-Parliamentary Union* (IPU), BKSAP sukses menggalang dukungan global untuk mempercepat pencapaian SDGs dan pemulihan pasca – pandemi Covid 19. Delegasi BKSAP berhasil menghasilkan suatu *outcome document* sebagai



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Puntho/mf

kesepakatan bersama antar lembaga parlemen sedunia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus mengajak seluruh anggota parlemen global untuk menjadikan pandemi Covid – 19 sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali komitmen dan upaya pencapaian SDGs. Menurutnya, SDGs tidak akan tercapai bila keterlibatan parlemen masih lemah, sehingga parlemen harus meningkatkan komitmen terhadap SDGs melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tidak hanya aspek ekonomi.

Ketua Gugus Tugas SDGs DPR RI ini menyatakan disparitas dan berbagai bentuk diskriminasi dapat menghambat pemerataan pembangunan dan mempengaruhi pemulihan dunia pasca pandemi.

Karena itu, parlemen harus menyusun kebijakan yang mendukung implementasi SDGs. *Political will* terutama dari anggota parlemen untuk mencapai SDGs karena parlemen bukan merupakan suatu prosedur melainkan representasi dari kehendak rakyat.

Melalui forum ini, tercapai beberapa poin kesepakatan bersama, pertama pandemi Covid – 19 telah menghambat pencapaian SDGs di berbagai bidang seperti penghapusan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi hingga penanganan dampak perubahan iklim. Karena itu, penguatan komitmen dan langkah bersama sangat esensial dan mendesak. Kedua, parlemen memainkan peran kunci dalam upaya pencapaian SDGs dan penanganan Covid – 19.



Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat Pertemuan Tahunan APPF Ke-29 dilakukan secara virtual, Senin (8/11/2021). Foto: Oji/mvl

Selanjutnya dalam poin ketiga, jaminan kesehatan universal perlu dikedepankan sebagai instrumen untuk memenuhi hak – hak warga negara dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Parlemen juga perlu memberi perhatian khusus pada upaya – upaya pencegahan dampak perubahan iklim melalui transformasi menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau.

### JAGA PERDAMAIAN DAN STABILITAS KAWASAN

Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik dan sekitarnya untuk mencapai stabilitas kawasan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Ia yakin bahwa upaya kolektif harus diwujudkan melalui resolusi, sehingga akan berkontribusi pada langkah menuju perdamaian dunia.

Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke – 29 yang diselenggarakan secara virtual, dengan Korea Selatan menjadi tuan rumah.

“Rancangan resolusi DPR RI tentang Kepemimpinan Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan di Asia-Pasifik dan sekitarnya telah diakomodir bersama dengan draf dengan tema serupa dari Republik Korea dan Rusia. Draf resolusi Indonesia menekankan bahwa parlemen di kawasan harus menganggap diri mereka sebagai aktor kunci dalam memastikan perdamaian dan keamanan di negara dan kawasan masing-masing,” ujar Puteri

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan peran parlemen tidak hanya mencakup kekuatan konstitusional yang telah diatur, namun juga diberdayakan dengan keyakinan bersama tentang

persatuan dan kerja sama antar parlemen melalui forum diplomasi.

“Berbagai isu terkait dengan asia pasifik ini misalnya spesifik apabila kita menyebut nama negara-negara seperti Myanmar yang sedang mengalami berbagai isu di negaranya, tadi juga sempat disinggung terkait dengan laut china selatan walaupun belum ada diskusi yang mendalam karena waktu yang begitu singkat, jadi mungkin diskusi ini akan dilanjutkan lagi di hari kamis tapi kami dari pihak Indonesia selalu berfikir bagaimana bisa mengamankan *interest*-nya Indonesia di dalam forum-forum seperti ini,” pungkasnya.

● ann/es

## RANCANGAN RESOLUSI DPR RI TENTANG KEPEMIMPINAN PARLEMEN UNTUK PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI ASIA- PASIFIK



# BAKN DPR RI

## Cermati **Alokasi Dana Negara**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara selama ini. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu selama tahun 2021 telah menggali persoalan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah-daerah yang dinilai belum tepat sasaran. Selain itu BAKN juga turut mengawasi penyaluran bantuan langsung serta problem agraria yang tengah ada.



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Ayu/rvi



**KETUA BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya** mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. “Karena sering kali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga kerap terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu BAKN DPR RI telah menjangkau berbagai macam pandangan dan pendapat ahli seputar persoalan DAK ini.

Misalnya saat mendatangi IPB, BAKN DPR RI menggali pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu



Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati. Foto: Mentari/mv

menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan.

Sehingga banyak rencana program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda. Sebut saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat.

“Karena kalau kita lihat sekarang, untuk transfer daerah tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa itu tidak ada pengawasannya di DPR RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. Artinya, tidak ada pengawasan sama sekali,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

#### KEBOCORAN BLT

Sementara itu Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menyoroti laporan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM yang tak tepat sasaran. Menurutnya pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala.

“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis.

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, program BLT memang untuk membuat pelaku UMKM terbantu, tapi belum cukup membuat UMKM bangkit lagi. “Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal,” tambah Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif. “Misalnya mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya,”

tegasnya. Anis pun mendorong pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan.

#### PROBLEM AGRARIA

Di sisi lain, Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai

PROGRAM BLT  
MEMANG UNTUK  
MEMBUAT PELAKU  
UMKM TERBANTU,  
TAPI BELUM CUKUP  
MEMBUAT UMKM  
BANGKIT LAGI.  
“BANTUAN PRODUKTIF  
ITU HANYA MENGATASI  
SALAH SATU MASALAH  
UMKM. SELAIN  
MEMBERIKAN BLT,  
PEMERINTAH JUGA  
HARUS MEMBANTU  
UMKM DALAM  
BERBAGAI HAL, BAIK  
FISKAL MAUPUN  
NONFISKAL





permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia selama ini sangat rumit, sehingga perlu diurai satu persatu. Menurutnya, perlu sebuah intervensi politik untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ada permasalahan yang memang sangat rumit di dalam permasalahan pertanahan ini. Apalagi hasil temuan BAKN-nya banyak memberikan uraian-uraian temuan yang memang perlu sebuah intervensi politik untuk bagaimana permasalahan ini bisa selesai,” ujar legislator dapil Jawa Timur II itu.

Misbakhun menambahkan, permasalahan pertanahan seperti adanya oknum mafia tanah, terjadi karena masih lemahnya aturan, penegakan hukum dan pengawasan. Untuk itu, BAKN yang bertugas melakukan telaah terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperkaya pandangan secara akademik melalui berbagai pertemuan dengan para akademisi.

**ADA PERMASALAHAN YANG MEMANG SANGAT RUMIT DI DALAM PERMASALAHAN PERTANAHAN INI. APALAGI HASIL TEMUAN BAKN-NYA BANYAK MEMBERIKAN URAIAN-URAIAN TEMUAN YANG MEMANG PERLU SEBUAH INTERVENSI POLITIK**



“Kalau kita mendapatkan pandangan dari akademisi maka akan diperoleh pandangan yang sangat jernih berdasarkan kajian-kajian akademik, menurut aturan, menurut pengalaman dan secara akademik seperti apa pandangan mereka,” tambah Politisi fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang

dan pertanahan nasional merupakan permasalahan yang melibatkan banyak unsur kepentingan. Serta dengan sejarah yang begitu panjang dan menyangkut banyak aspek.

“Aspeknya mulai dari hukum itu sendiri, pertanahan itu sendiri, aspek sosiologi, antropologi masyarakat, dan kemudian ya kembali kepada permasalahan hukum yang harus diselesaikan,” tukasnya. ● ah/es



Anggota BAKN DPR RI Mukhammad Misbakhun. Foto: Bianca/hvl

# MKD DPR RI

## Tegakkan Etik untuk Jaga Martabat Dewan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan rakyat. MKD bekerja berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.



Pimpinan dan Anggota MKD DPR RI foto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani usai seminar nasional MKD. Foto: Eno/mv



**BISA** dikatakan sepanjang tahun 2021 ini tidak ada pengaduan yang berarti hingga harus membuat MKD bersidang, membuat keputusan,

ataupun menjatuhkan sanksi.

Meski demikian MKD terus bekerja menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai penegak etik di DPR RI. Berikut beberapa kerja MKD dalam kurun waktu satu tahun terakhir yang berhasil dirangkum Parlementaria.

### BEKERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK

Selain sebelumnya bekerja sama dan menyosialisasikan tentang tugas dan tata beracara MKD ke Lembaga Penegak Hukum, di tahun 2021 ini MKD juga membangun sinergi dengan

berbagai partai politik. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir pelanggaran etika yang dilakukan para anggota dewan. Dengan kata lain menurut Ketua MKD, Habib Aboebakar Alhabsy dan Mahkamah Partai harus berjalan seiringan mencegah pelanggaran etika.

Atas dasar itulah Senin (22/3) lalu MKD Menggelar Seminar Nasional bertajuk "Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan : Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan

Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik". Hal itu tak lain sebagai upaya MKD untuk mendapatkan sinergi kelembagaan, karena tugas MKD sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan berbagai *stakeholder* partai.

"Kami ingin agar Parpol bersinergi dengan MKD mencegah terjadinya pelanggaran etika. Apalagi hampir di setiap partai ada Mahkamah atau dewan kehormatannya," ungkapnya.

### MINTA AMENDEMENT UUD 1945 TIDAK DILAKUKAN TERBURU-BURU

Wakil Ketua MKD DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. Saleh mengingatkan, amendemen konstitusi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. "Kalau belum siap, sebaiknya ditahan dulu," kata Saleh Agustus lalu.

Ia menjelaskan bahwa amendemen UUD 1945 bukanlah pekerjaan mudah karena perubahan pasal dalam konstitusi akan berpengaruh besar pada sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, ia mengingatkan, seluruh kekuatan politik, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya terlebih dahulu perlu merumuskan agenda dan

batasan amendemen. Meski ada kesepakatan dari semua fraksi dan kelompok DPD terhadap perubahan yang diajukan agar tidak ada kekhawatiran bahwa amendemen melebar ke isu lain.

"Konstitusi adalah milik seluruh rakyat. Perubahan terhadap konstitusi sebaiknya didasarkan atas aspirasi dan keinginan rakyat. Perubahan itu pun tidak boleh hanya demi tujuan politik sesaat," tegas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut. Adapun secara teknis, amendemen UUD 1945 juga tidak mudah karena mesti diajukan oleh setidaknya 1/3 anggota MPR.

Kemudian harus ada sidang yang dihadiri 2/3 anggota MPR dan keputusan amendemen mesti disetujui oleh 50 persen plus 1 dari seluruh Anggota MPR. Saleh pun berkaca pada isu amendemen yang sempat menguat pada MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019, tetapi amendemen belum bisa dilaksanakan pada periode tersebut.

"Nah, bila hari ini amendemen UUD 1945 diagendakan lagi, maka kesulitan yang sama tetap akan ada. Ditambah lagi, Indonesia sedang fokus menghadapi pandemi. Tentu akan ada persoalan kepatutan jika melakukan amendemen di tengah situasi seperti ini," terang Saleh yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI.

Anggota MKD DPR RI  
Maman Imanulhaq.  
Foto: ist/nvl

### SOSIALISASI TNKB KHUSUS ANGGOTA DPR

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Maman Imanulhaq menjelaskan tujuan kunjungan kerjanya ke Kota Bandung, khususnya ke Polrestabes Bandung untuk menyosialisasikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Anggota DPR RI.

"Sosialisasi tentang TNKB Khusus Anggota DPR RI ini sangat penting agar tidak terjadi *miss* komunikasi atau permasalahan-permasalahan di kemudian hari," ujar Maman dalam kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polresta Bandung.

Dijelaskan Maman, TNKB khusus anggota DPR RI ini sangat penting untuk menjaga etika dan martabat seluruh Anggota DPR. "Sebut saja jika dikemudian hari ada anggota masyarakat yang melihat kendaraan dengan TNKB DPR RI terparkir di sebuah tempat karaoke di waktu yang tidak diperbolehkan, maka masyarakat bisa melaporkannya ke MKD dengan mencatat nomor kendaraan yang tertera," jelasnya.

Dengan kata lain, sambung politisi Fraksi PKB ini, masyarakat dapat ikut mengawasi wakilnya yang ada di DPR. Dan secara tidak langsung hal itu juga bisa menegakkan etika sekaligus menjaga marwah dan martabat Anggota DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Maman juga menjelaskan bahwa TNKB DPR RI itu masuk dalam salah satu hak protokoler yang diterima Anggota DPR RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf g dan pasal 25 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, kemudian diatur dalam Pasal 205 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Selain itu juga ada dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan STNK dan TNKB Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Serta Surat telegram Kapolri dengan nomor STR/164/III/YAN/1.2/2021 Penerbitan TNKB khusus anggota DPR RI. ● ayu/es



# Sambut Parlemen Modern dengan Big Data

Dalam upaya memberikan dukungan yang prima baik di bidang administrasi, persidangan, maupun data dan informasi yang profesional, andal dan akuntabel pada penyelenggaraan fungsi DPR RI, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.



## UPAYA

peningkatan kualitas tersebut ditunjukkan Setjen DPR RI dengan berbagai prestasi yang diterima, mulai dari Raih Juara II

'Continuous Improvement BMN Award', Predikat Badan Publik Informatif dari KIP, Opini WTP dalam laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah 12 kali berturut turut

Tak hanya itu, Setjen DPR RI untuk memberikan pelayanan digital guna mewujudkan parlemen modern melalui banyak gebrakan salah satunya *big data*. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa *big data* yang sedang dibangun sangat penting untuk mendukung peran parlemen modern.

"Parlemen modern dalam konteks mendukung fungsi parlemen, maka peran *big data* menjadi hal yang sangat penting untuk segera diimplementasikan. Transformasi data menjadi dasar perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang penting bagi DPR. Sistem pengambilan keputusan dapat diintegrasikan kepada *big data* DPR untuk mendukung pelaksanaan fungsi parlemen modern



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Oj/invl

yang efektif dan produktif," ujar Indra.

Ia pun menyampaikan juga, kehadiran *big data* yang terkelola dengan baik bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan publik. Bahkan, menurut Indra, *big data* juga menjadi solusi untuk menuntaskan berbagai masalah yang ditemui DPR RI. *Big data* dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam tugas-tugas kedewanan, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran.

"Pemanfaatan *big data* dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, pencarian solusi atas permasalahan masyarakat terhadap layanan publik, sebagai media pengawasan terhadap kebijakan publik, dan lain-lain," ucap Indra.

Tak hanya itu, informasi yang berkaitan dengan aktivitas parlemen dapat dengan cepat dan tepat diketahui oleh masyarakat secara luas, sebagai salah satu upaya DPR RI untuk mendekatkan diri dengan rakyat menuju keterbukaan parlemen, yaitu lembaga legislatif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam Pengelolaan *big data*, menurutnya, informasi yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan cara yang efektif. Indra Iskandar memandang, pengelolaan tersebut nantinya akan membantu berbagai kebutuhan informasi dalam pembentukan legislasi, mulai dari naskah akademis hingga penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) di DPR RI.

"Harus dipahami bahwa saat ini data adalah raja. Semua keputusan

di DPR ke depannya harus berbasis data. Big data yang masih dalam proses dibangun ini akan menjadi mesin-mesin bagi publik untuk mengakses berbagai keputusan keputusan politik DPR,” kata Indra.

### DIGITALISASI ADMINISTRASI

Sejalan dengan pembentukan big data, Setjen DPR RI juga berupaya melakukan migrasi di bidang administrasi. Berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini mulai menggunakan teknologi digital. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pembentukan sistem big data yang saling terhubung satu dengan lainnya dengan muara menjadi Parlemen Modern dan profesional.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Setjen DPR RI diantaranya yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi E-Sign dan SNIPER. Kegiatan ini diselenggarakan untuk jajaran pejabat dan staf di lingkungan Deputy Bidang Persidangan yang terdiri dari enam biro.

Plt Deputy Bidang Administrasi sekaligus Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko mengatakan penggunaan tanda tangan digital (*e-signing*) dan aplikasi Sniper ini merupakan terjemahan konkret dari harapan untuk

mewujudkan parlemen modern serta transformasi digital.

“Dengan ini nanti kita berharap ke depannya cara-cara kerja kita, budaya kita kedepannya akan semakin efektif, semakin cepat, semakin teliti, semakin akurat dalam memberikan pelayanan kepada DPR,” ungkap Jaka. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan Sistem Informasi Persidangan Paripurna DPR RI (SIPERDANA) yang digagas oleh Bagian Persidangan Paripurna Biro Persidangan Setjen DPR RI.

Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR Suprihartini menerangkan, Bagian Persidangan Paripurna mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat persidangan paripurna. Melalui ini diharapkan kegiatan tersebut pelaksanaannya dapat melalui teknologi informasi secara digital.

Dalam hal kearsipan, Setjen DPR RI melakukan sosialisasi kearsipan, dengan tujuan menciptakan tata kelola arsip menuju sadar dan tertib arsip. Suratna menambahkan, bahwa Bagian Arsip

DPR RI telah menyusun berbagai regulasi untuk menyempurnakan dan memutakhirkan peraturan yang ada disesuaikan dengan dinamika organisasi dan peraturan kearsipan baik UU, Peraturan Pemerintah maupun peraturan arsip republik Indonesia. ● hal/es



Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko. Foto: Jaka/nvl



Foto bersama pejabat di lingkungan Setjen DPR RI usai sosialisasi aplikasi e-Snipер. Foto: Jaka/nvl

# BK DPR Komitmen Beri Dukungan Terbaik

Guna mendukung sekaligus memperkuat fungsi DPR RI yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Badan Keahlian (BK) DPR RI berupaya serius meningkatkan kinerjanya. Menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebijakan akibat pandemi Covid-19, BK DPR RI terlibat menciptakan berbagai terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik.



**SEPANJANG** tahun 2021, BK DPR RI sangat memahami betul bahwa data harus dipandang vital sebagai dasar perumusan kebijakan publik.

Tanpa data yang valid dan akurat, kebijakan yang dirumuskan akan timpang.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, satu data jadi sangat penting sebagai basis pengambilan kebijakan. DPR RI pun sedang menginisiasi wacana penting ini agar adanya keseriusan membangun satu data penting yang menyangkut kebijakan di Indonesia. Sebelumnya, data Indonesia tersebar di berbagai kementerian dan lembaga yang kerap saling berbeda.

“Satu data menjadi isu penting ke depan. Harusnya DPR dan kementerian/lembaga mengambil keputusan yang basisnya data, baik data kemiskinan, lahan produktif, kependudukan, infrastruktur, dan lain-lain,” ucap Indra.

Ia pun mengungkapkan kini DPR RI sedang mengarsiteki pembangunan *big data* khusus di lingkungan parlemen. Rencananya, pada pembangunan *big data* ini akan mengintegrasikan semua data penting sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan wacana pengintegrasian data sebetulnya bukan hal baru. Namun, komitmen data tersebut harus segera terealisasi. Di DPR berusaha mewujudkannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan untuk menunjang kerja para anggota dewan.

Ia pun menguraikan bahwa, pembangunan *big data* akan mendorong

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Ojijw

BK DPR RI bekerja sesuai *evidence base legislative policy making*. Sehingga, data dan informasi yang tersaji mengandung argumentasi kuat baik yang berasal dari setiap komisi, baik pembahasan UU maupun pembahasan APBN, dan pengawasan yang didukung data yang empiris maupun ilmiah.

“Ke depan, data ini makin dirasakan penting, sehingga harus dikelola dengan baik. Kami di Badan Keahlian DPR RI sangat menekankan pentingnya data dalam mendukung dewan sehingga kami menyetujui spirit kerja kami melalui pembangunan *big data*,” tutur Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul.

Lebih lanjut, pembangunan *big data* ini bernilai strategis di era digital. Ia melihat peluang besar bahwa pengumpulan data yang akurat melalui *big data* akan menghasilkan keputusan yang tepat pula. Dengan disahkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin memperkuat pengaturan tata kelola data untuk mendukung kebijakan demi pembangunan holistik.

Agar wacana pembangunan *big data* di DPR RI jadi nyata, maka SDM yang cakap digital harus terpenuhi. Sensi menekankan SDM berperan penting supaya pertukaran dan integrasi data bisa berjalan dengan baik sesuai harapan.

“Pembangunan dan pengembangan *big data* di DPR RI memerlukan strategi yang tepat, infrastruktur informasi, dan komunikasi. Maka perlu melibatkan SDM yang cakap digital, sehingga proses integrasi dan pertukaran data internal-eksternal berjalan dengan baik dan lancar.” terangnya.

## DUKUNG KAJIAN TERKAIT KEUANGAN NEGARA

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah diberi ruang kebijakan yang sangat besar terkait penanganan Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuannya,



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Jaka/ivi

melalui perannya, DPR perlu mengkritisi sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) yang berada di bawah naungan BK DPR RI untuk turut ambil peran memberi dukungan kajian.

“Pemerintah sudah diberi ruang melalui UU No.2/2020 yang tadinya Perppu No.1/2020. Kalau semakin besar ruangannya itu, perlu dikritisi dan diawasi. Kecenderungan korupsi bisa saja terjadi. Fungsi *checks and balances* harus kuat,” ucap Sensi.

Seperti diketahui, UU No.2/2020 mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Regulasi ini, menurut Sensi, merupakan kebijakan sentral untuk menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Alokasi anggarannya pun sangat besar mencapai Rp579,78 triliun untuk tahun 2020.

Oleh sebab itu, PKAKN melakukan *check and balances* yang kuat di parlemen dengan mengawasi pergerakan anggaran PC-PEN yang sangat besar. Hasil kajian PKAKN akan

diserahkan ke semua alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. “Kita tetap ingin menjaga agar mekanisme di pemerintah tetap berjalan. Namun, fungsi *check and balances* antara pemerintah dan DPR juga berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan, BK DPR RI berusaha memperkuat sistem pengawasan tersebut. Ia tidak ingin pengawasan berhenti pada tataran pembicaraan. Lebih dari itu, ia ingin pengawasan menjadi bekal untuk memberikan masukan yang cepat, tepat, dan akurat bagi DPR. Di dalamnya juga dapat menjembatani pandangan dari para pakar dan akademisi, kemudian menjadi bahan kajian yang disajikan bagi semua AKD di DPR.

“Prinsip di BKD adalah cepat, tepat, dan akurat. Saya harapkan, setelah diskusi hari ini, dua atau tiga hari yang akan datang sudah ada output-nya. Bahkan, sudah ada tanggapan kepada komisi terkait. Jangan juga terlalu lama. Anggota Dewan tidak mau bertele-tele. Kita semua membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk mengambil kebijakan yang baru,” tandasnya. ● ts/es

# Parlemen Modern Melalui Penganggaran yang Berkualitas, Berintegritas, dan Kolaboratif

Inspektorat Utama (Ittama) mendukung penuh gagasan DPR RI menjadi Parlemen Modern yang setara dengan parlemen di negara-negara maju. Salah satu aspek utama dalam konsep Parlemen Modern adalah transparansi, baik yang menyangkut kebijakan administratif maupun penganggaran. Sehingga, setiap penganggaran di internal Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memiliki kredibilitas memadai dan dapat diawasi publik.



**ITTAMA** DPR RI sebagai institusi penting dalam pengawasan internal di kesetjanaan, telah melakukan langkah progresif, yaitu

telah menjadi institusi setara eselon I sejak enam tahun lalu. Kedudukan yang setara dengan eselon I ini memungkinkan pengawasan internal dapat lebih optimal, karena memiliki kedudukan yang setingkat dengan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sebelumnya, fungsi pengawasan internal Setjen DPR RI berada di bawah Biro Perencanaan dan Pengawasan setingkat Eselon III, yang dipimpin oleh seorang kepala bagian. Namun, dengan dukungan penuh dari para Anggota DPR RI yang tergabung dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, akhirnya fungsi pengawasan secara struktural kelembagaan, ditingkatkan menjadi setara dengan Eselon I.

“Saya mendukung penuh Ittama selaku Pengawas Internal di Setjen DPR. Itu terbukti dengan perubahan

Ittama yang sejak enam tahun lalu telah berubah bentuk menjadi setara dengan eselon I,” ujar Kepala BURT DPR RI, Agung Budi Santoso beberapa waktu lalu.

Dukungan dari BURT DPR RI ini berbuah hasil. Sederet prestasi pun diterima oleh Setjen DPR dibantu Ittama. Di antaranya ikut membantu Setjen DPR hingga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam proses pemeriksaan pengelolaan anggaran (audit) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut. Untuk mempertahankan predikat ini,

Asistensi Ittama DPR RI ini juga membuahkan hasil dengan capaian dua unit kerja, yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang telah memperoleh WBK. Selanjutnya dua unit tersebut, akan didorong untuk meraih predikat Wilayah



Inspektor Utama (Ittama) Setjen DPR RI  
Setyanta Nugraha. Foto: Jaka/mvi



Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara enam unit kerja Eselon II lainnya pun sedang dalam asistensi untuk menjadi unit kerja zona integritas menuju WBK. Selanjutnya, untuk Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Kepegawaian pun sedang dalam asistensi Ittama DPR RI menuju WBK dan WBBM di tahun ini.

Untuk mempertahankan capaian WTP serta penambahan jumlah unit kerja baik untuk mencapai predikat WBK maupun yang dilanjutkan ke WBBM, maka Ittama DPR RI pada tahun ini juga telah merancang panduan penyusunan anggaran DPR RI pada 2022 agar berkualitas, berintegritas, dan kolaboratif. Indikator ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk 2022.

Indikator berkualitas, yakni secara formal adalah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKD, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada kerugian negara, juga kinerja yang diukur dari angka-angka dalam konteks reformasi birokrasi.

Selain berkualitas, anggaran yang disusun harus memenuhi kaidah berintegritas. Yaitu, harus memenuhi kaidah-kaidah efektif, efisien, ekonomis, dan *compliance* (pemenuhan) atau taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran berintegritas juga harus memenuhi asas atau kaidah aspek keadilan dan kepatutan.

“Oleh karena itu perlu ketika saya menyampaikan adalah lebih menekankan pada bagaimana menyusun anggaran berintegritas. Intinya integritas itu dapat dipertanggungjawabkan dari aspek *output*, *outcome*, dan juga dalam aspek pengelolaan keuangan negaranya,” jelas Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, penyusunan anggaran DPR RI pada tahun 2022 juga perlu memenuhi hal yang diharapkan yaitu kolaborasi. Menurut Totok, sapaan



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat menyampaikan dukungannya kepada Ittama Setjen DPR sebagai pengawas internal. Foto: RAN/ivi

akrabnya, anggaran yang memenuhi unsur kolaborasi adalah harus dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Karena itu, Totok memastikan Ittama Setjen DPR RI telah melakukan pergeseran paradigma dalam pengawasan. Sehingga, menempatkan pihak yang diawasi sebagai seorang klien dan hubungan yang bersifat lebih konstruktif.

Yaitu, Ittama DPR RI sebagai pengawas kinerja anggaran Setjen DPR RI menempatkan indikator bukan pada semakin banyaknya temuan akan semakin baik. Tetapi, saat ini, bukan pada temuannya. Melainkan, seberapa banyak saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola menuju *good governance*.

“Kalau dulu juga inspektorat hanya *post audit*, mengaudit setelah selesai kegiatan. Tapi, kita juga bisa melakukan sekarang ini *pre audit* pada saat kegiatan jalan. Itu beberapa paradigma yang sudah kita ubah,” tambanya.

Karena baiknya asistensi Ittama DPR RI dalam melakukan pengawasan internal serta pemberian masukan,

Setjen DPR RI meraih level 3 terbaik dalam pengelolaan manajemen dan juga level 3 untuk pengawasan internal kementerian dan lembaga. Dengan capaian ini, berarti Setjen DPR RI telah memenuhi kapabilitas dan leveling yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

“Pada keduanya kita sudah level 3, artinya sudah memenuhi kapabilitas dan leveling,” jelas Toto, sapaan akrabnya.

Terakhir, pada awal November ini, Ittama DPR RI telah inisiatif bekerja sama dengan Setjen DPR RI mendirikan *Association Certified Mitigation in Procurement* melalui konsep *pentahelix*. Ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kontribusi dan solusi terhadap pencegahan munculnya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

pendirian *Association Certified Mitigation in Procurement* ini diharapkan dapat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu membawa misi sosial dan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan memberikan fasilitas pelatihan tanpa biaya atau gratis. ● rdn/es



**Oleh: Dedi Fahrudin, M.I.Kom**

- Deputi Direktur Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta
- Dosen Komunikasi UIN Jakarta

# DPR RI, Bekerja di Tengah PANDEMI COVID-19

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di parlemen memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab yakni menjalankan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan fungsi-fungsi tersebut diharapkan DPR dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Fungsi legislasi DPR menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menyetujui atau pun tidak menyetujui peraturan pemerintah yang diajukan oleh Presiden.

**D**ari target penetapan 246 Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, ada 33 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2021. DPR sudah menghasilkan empat RUU yang sudah rampung dikerjakan dan disetujui dalam rapat paripurna. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja.

DPR juga mengesahkan empat RUU kumulatif terbuka, yakni RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik

dalam Masalah Pidana, RUU tentang Persetujuan ASEAN, RUU tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Hal ini patut diapresiasi ditengah pandemi Covid 19 anggota DPR tetap produktif menjalankan fungsinya, walaupun harus diakui belum maksimal hasilnya. Salah satunya adalah keterbatasan tatap muka dalam persidangan pembahasan RUU, hal ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam pembahasan RUU. Dimana dinamika sidang tatap muka tentunya akan berbeda dengan daring, hambatan komunikasi hingga masalah teknis bisa jadi memperlambat pembahasan tersebut. Kemudian perbedaan

pendapat antar fraksi yang berlarut-larut menyebabkan molornya penetapan RUU yang sudah diagendakan.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi dan memberikan catatan kinerja legislasi DPR masa sidang I tahun 2020-2021, yaitu rendahnya capaian legislasi DPR. Pada masa sidang ini DPR hanya mampu menghasilkan satu RUU prioritas, yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari tujuh RUU



prioritas untuk dibahas (CNN Indonesia).

Fungsi pengawasan DPR juga belum maksimal mengawasi pelaksanaan penanganan pandemi Covid 19 khususnya, sehingga terjadi beberapa kasus yang seharusnya tidak terjadi sejak awal jika pengawasan ketat. Seperti harga *rapid test* dan PCR yang melambung tinggi diawal pandemi, hingga belakangan mulai ramai di masyarakat terkuak berapa harga yang sesuai, ternyata ada kepentingan bisnis juga dibalikinya yang lebih dominan. Sebagai aktifitas bisnis selayaknya mendapatkan keuntungan sewajarnya, tentunya dengan tidak melupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan kesehatan.

Perlunya optimalisasi program-program reses DPR untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama konstituennya, agar lebih terasa efeknya bagi masyarakat. Hal ini tentu akan berimbas juga pada peningkatan reputasi anggota dewan di masyarakat. Pada kenyataannya reses belum banyak bermanfaat bagi masyarakat bahkan anggota dewan sendiri.

Masa reses merupakan kesempatan emas bagi anggota dewan untuk menjumpai konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Anggota dewan dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja untuk mengumpulkan dan menampung aspirasi konstituennya, sehingga tahu benar permasalahan-permasalahan mendasar di masyarakat.

DPR juga menjalankan fungsi anggaran dengan menetapkan lima persen pertumbuhan ekonomi dan tiga persen laju inflasi. Namun, apakah ini merupakan angka yang realistis ditengah ketidakpastian ekonomi global. Bersama dengan eksekutif, legislatif dapat bekerjasama untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi untuk pemulihan dampak pandemi. Legislatif juga dapat mendorong pemerintah untuk memberikan insentif lebih besar kepada usaha-usaha mikro dan sektor rill, agar roda ekonomi dapat bergerak kembali dengan leluasa.

Banyak harapan masyarakat yang digantungkan dipundak legislatif, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kinerja DPR masih jauh dari target pencapaian yang ditetapkan. Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja DPR yang belum maksimal ini dapat menimbulkan disonansi kognitif. Menurut **Leon Festinger** (*Selective attention*) – yaitu dengan memberikan perhatian pada hal yang khusus atau bagian dari informasi yang sama dengan kepercayaan, pemikiran, dan tindakan seseorang atau masyarakat. Dimasa pandemi yang belum juga berakhir, sebaiknya DPR memusatkan perhatian pada penanganan pandemi secara terarah dari hulu hingga hilir, untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya. Melalui fungsi legislasi, anggota dewan dapat membuat regulasi terkait dengan penanganan pandemi baik dari segi kesehatan

masyarakat, maupun penguatan ekonomi mikro sebagai penopang ekonomi makro secara umum.

DPR juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap regulasi hingga pelaksanaan dilapangan, sehingga tidak terjadi deviasi yang merugikan semua pihak. Kemudian yang terpenting lagi, pengesahan anggaran penanganan pandemi dapat lebih dipercepat sebagai prioritas utama. Dan mendorong eksekutif untuk merealisasikan anggaran pada sektor-sektor penting, terutama masalah kesehatan dan peningkatan ekonomi.

Kedua *Selective retention* ketika seseorang mengingat informasi yang konsisten dengan kepercayaan yang dimiliki. Dalam hal ini anggota dewan harus konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat, dengan konsistensi yang tinggi, masyarakat akan melihat dan mengapresiasi apa yang dilakukan anggota dewan di parlemen, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga DPR.

Masih ada waktu untuk berbenah diri dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dengan niat yang baik dan usaha maksimal bersinergi mengesampingkan kepentingan-kepentingan politis parsial. Mengedepankan kepentingan masyarakat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kerja nyata DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, akan meningkatkan reputasi dan citra yang baik dimata masyarakat. ●





Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memotong pita membuka ketika membuka kegiatan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen X, di Selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (23/11/2021). Pameran ini mengangkat tema 'Bersatu Lawan Pandemi'. Foto: Geraldi/Man



Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (10/12/2021). Foto: Jaka/Man





Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar foto bersama usai menghadiri 'Talkshow Olahraga dari Hobi ke Profesi' di Ballroom Menara BNI, Pejompongan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Foto: Jaka/Man



Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja pembicaraan tingkat I terhadap RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2021). Foto: Mentari/MAN



# Dengar Keluh-Kesah Masyarakat sembari nge-Vlog

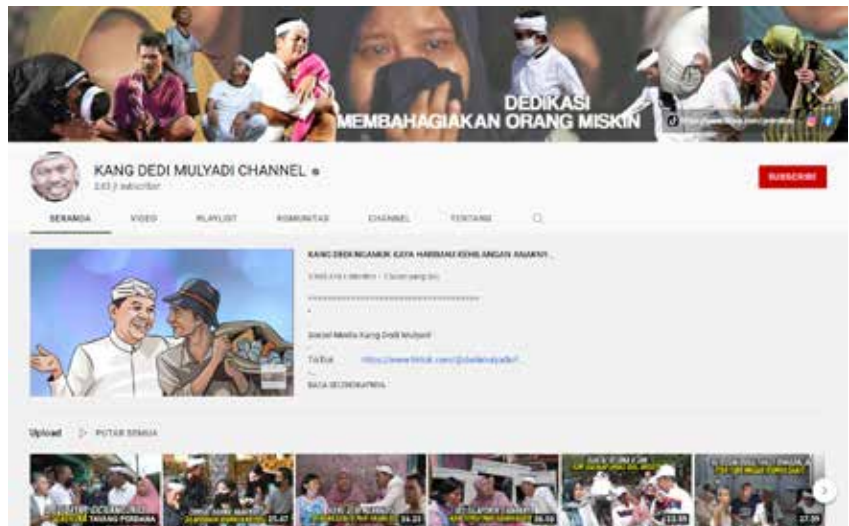
Dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kota Majalengka dipenuhi dengan berbagai kejadian unik yang meyenangkan. Bagaimana tidak jalan yang ditempuh untuk menuju lokasi acara dipenuhi berbagai tantangan mulai dari jalan yang kurang mendukung hingga sambutan unik yang dilakukan para petani desa tersebut.

**H**al inilah yang menjadikan kesempatan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi untuk mengisi konten youtubena mengenai kejadian-kejadian yang terjadi sewaktu perjalanan. Dalam perjalanan banyak masyarakat yang mengerubungi mobilnya hanya untuk sekedar berfoto maupun mencurahkan keluh-kesah mereka.

Dalam sambutannya Kang Dedi menyampaikan tujuannya mengunjungi Kota Majalengka dalam rangka mendengarkan pendapat dari pihak PG Jati Tujuh dan keluhan masyarakat setempat mengenai permasalahan lahan yang terjadi

“Kita mengunjungi Majalengka dalam rangka permasalahan lahan yang terjadi, Saya meminta negara dapat berperan. Mereka memiliki peran untuk mendorong masyarakatnya berpartisipasi menjadikan areal ini sebagai areal untuk membangun kesejahteraan dengan pola kemitraan,” ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PG Jatitujuh, di Majalengka, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021).

Maka tak heran ketika rombongan



Tangkapan layar Chanel Youtube milik Anggota DPR RI Dedi Mulyadi.

kunjungan Komisi IV meninggalkan lokasi acara iring-iringan kendaraan sering berhenti secara mendadak karena banyak masyarakat yang berebut untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi .

“Ketika meninggalkan lokasi acara banyak masyarakat yang mengerubungi dengan tujuan menyampaikan keluh kesah mereka,” ucap mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.

Diketahui, selain berprofesi sebagai

seorang Legislator, Dedi kerap kali menyempatkan diri untuk nge-vlog, dimana jumlah *subscriber* dari akun Youtube-nya yang bernama 'Kang Dedi Mulyadi Channel' hampir mencapai 3 juta pengguna.

Dedi mengaku bahwa tujuannya menjadi seorang konten creator untuk mendengarkan serta menyampaikan keluh-kesah masyarakat yang kemudian disebarakan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. • [tn/es](#)



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**RACHMAT GOBEL**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPRI



**LODEWIJK F. PAULUS**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPRI



**PUAN MAHARANI**  
KETUA DPR RI



**SUFMI DASCO AHMAD**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPRI



**A. MUHAIMIN ISKANDAR**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPRI

*Selamat*  
*Hari Raya Natal*  
dan Tahun Baru 2022



@ DPR\_RI



DPR RI

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)



@ DPR\_RI



DPR RI

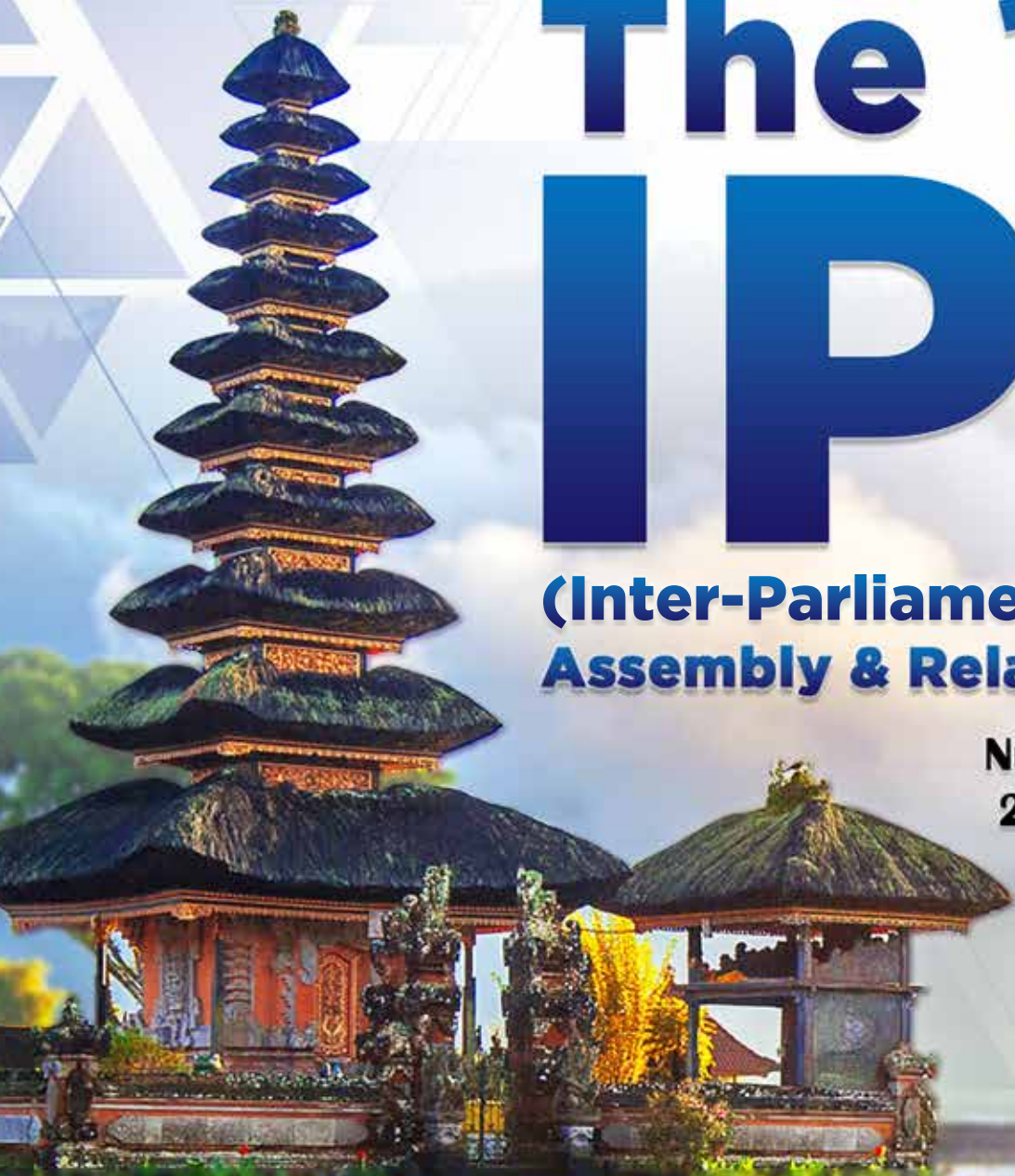


**SAVE THE  
DATE!**

# The 144<sup>th</sup> IPU

**(Inter-Parliamentary Union)  
Assembly & Related Meetings**

**Nusa Dua, Indonesia  
20 - 24 Maret 2022**



@DPR\_RI



DPR RI